



NOTA KESEPAKATAN

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020**



WALIKOTA MADIUN

NOTA KESEPAKATAN

NOMOR : 188/ 13 /401.024/2020

NOMOR : 188/ 07 /401.040/2020

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA

WALIKOTA MADIUN

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (04 - 08 - 2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.** : Walikota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Madiun yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ANDI RAYA BAGUS M. S, SH** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun
3. **Drs. ISTONO, M.Pd** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun
4. **Drs. H. ARMAYA** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yang beralamat di Jalan Taman Praja Nomor 97 Madiun selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 yang akan dijadikan dasar dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2021.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat menerima dengan baik hasil pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 yang meliputi :
 - a. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah ;
 - b. Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan Perangkat Daerah ;
 - c. Plafon Anggaran Sementara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ; dan
 - d. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021.
3. Untuk proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan hasil Nota Kesepakatan bersama Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan anggota DPRD Kota Madiun.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA MADIUN,

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN,**

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

ANDI RAYA BAGUS M.S, SH

WAKIL KETUA,

Drs. ISTONO, M.Pd

WAKIL KETUA,

Drs. H. ARMAYA

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	2
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	5
2.1. Rencana Pendapatan Daerah	5
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah	5
2.1.2. Pendapatan Transfer	7
2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10
2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan	12
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	13
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	129
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kagiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi	129
4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. Berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi	175

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	176
BAB VI PENUTUP	177

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021	11
Tabel 3.1	Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	15
Tabel 3.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	24
Tabel 3.3	Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	35
Tabel 3.4	Prioritas Program, Kegiatan, sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	46
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	129
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Menurut Penunjang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	159
Tabel 4.3	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Klasifikasi Belanja Tahun Anggaran 2021	175
Tabel 5.1	Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2021	176

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Komponen PAD Kota Madiun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021	6
Gambar 2.2	Persentase Pertumbuhan PAD Kota Madiun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.....	6
Gambar 2.3	Komponen Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021	7
Gambar 2.4	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021	8
Gambar 2.5	Komponen Pendapatan Transfer Pusat Kota Madiun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021	8
Gambar 2.6	Komponen Pendapatan Dana Perimbangan Kota Madiun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021	9
Gambar 2.7	Komponen Pendapatan Transfer antar Daerah Kota Madiun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021	9
Gambar 2.8	Komponen Lain-lain Pendapatan yang sah Kota Madiun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021	10
Gambar 2.9	Persentase Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan yang sah Kota Madiun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan salah satu kewajiban Pemerintah daerah sebagai bagian dari mekanisme perencanaan/penganggaran, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PPAS dijabarkan sebagai dokumen yang menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing Perangkat Daerah (PD) berdasarkan program kegiatan. Pagu anggaran ini dapat menjadi pagu definitif apabila peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disepakati oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ayat (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Dalam ayat (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan :

- a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan Program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun; dan
- c. Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Penyusunan PPAS Kota Madiun tahun 2021 berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Madiun Tahun Anggaran 2021, Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun tahun 2021 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun. PPAS selanjutnya dijadikan sebagai bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang PPAS Kota Madiun Tahun 2021 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing Perangkat Daerah.

PPAS Tahun Anggaran 2021 berisi tentang Rencana Pendapatan dan Pembiayaan Kota Madiun, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan (urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang), program/kegiatan dan rencana pembiayaan daerah. Dengan tersusunnya PPAS Tahun 2021 ini, diharapkan pelaksanaan program prioritas daerah dan penggunaan anggaran tahun 2021 memiliki arah dan bingkai yang jelas dalam pelaksanaannya.

1.2. TUJUAN

PPAS Kota Madiun Tahun 2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menetapkan plafon anggaran sementara prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021;
- b. Sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021;
- c. Sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2021 pada masing-masing OPD yang dianggarkan melalui RAPBD Tahun Anggaran 2021;

1.3. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan PPAS Kota Madiun 2021 sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- I. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- t. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E).

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Perkembangan realisasi penerimaan daerah dalam periode 2016-2019 dan proyeksi 2020-2021 menunjukkan adanya tren kenaikan yang berasal dari kenaikan pendapatan daerah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pertumbuhan pajak daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rencana penerimaan pemberian yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SiLPA) menunjukkan fluktuasi dan diupayakan diminimalisasi melalui efektivitas kegiatan dan akurasi perencanaan pendapatan. Peningkatan realisasi penerimaan tersebut, disamping merupakan hasil upaya Pemerintah Daerah, juga dipengaruhi oleh perkembangan kondisi makro ekonomi nasional dan daerah, faktor eksternal, dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah.

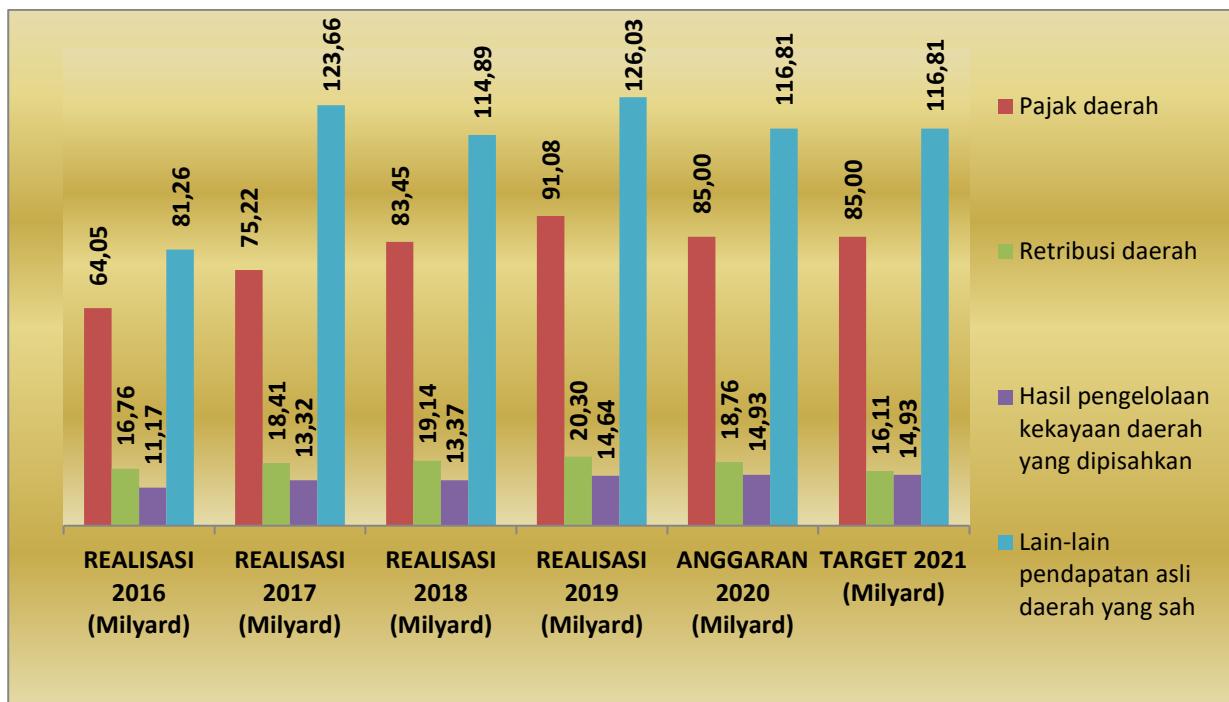
2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Dalam menentukan rencana pendapatan daerah, diupayakan untuk memperhatikan potensi yang ada dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya serta tahun berjalan. Dari hal tersebut, selanjutnya pengeluaran dapat dilakukan dalam bentuk belanja daerah serta pemberian yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan daerah Kota Madiun tahun anggaran 2021 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 6,76% atau menjadi Rp 985.494.259.140,00 atau menalami penurunan sebesar Rp. 71.412.044.860,00. Hal ini diakibatkan oleh terjadinya penurunan hampir di semua jenis pendapatan, karena secara nasional maupun global yang masih menghadapi wabah covid 19, yang tentu saja sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian.

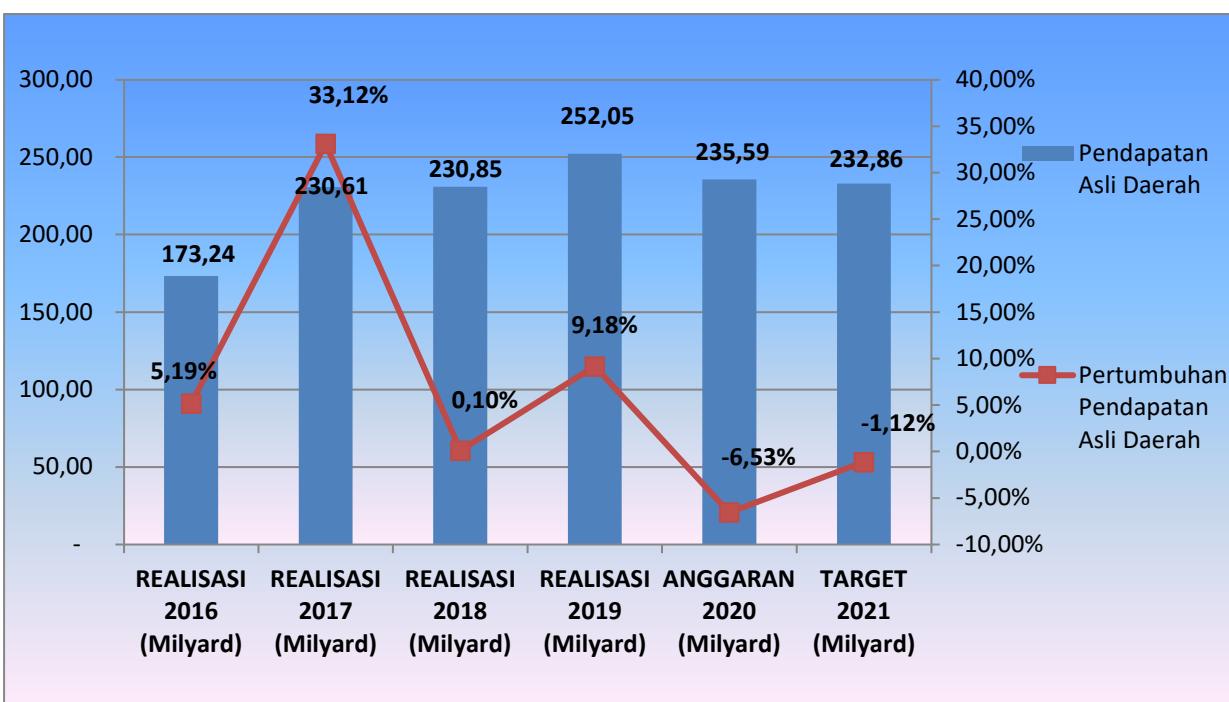
2.1.1.PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun 2021 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar minus 1,12% atau berkurang sebesar Rp. 2.648.487.860,00 dari jumlah anggaran pada Tahun 2020 atau menjadi sebessar Rp. 232.856.140.000,00.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020, data diolah

Gambar 2. 1.
Komponen PAD Kota Madiun
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020 data diolah

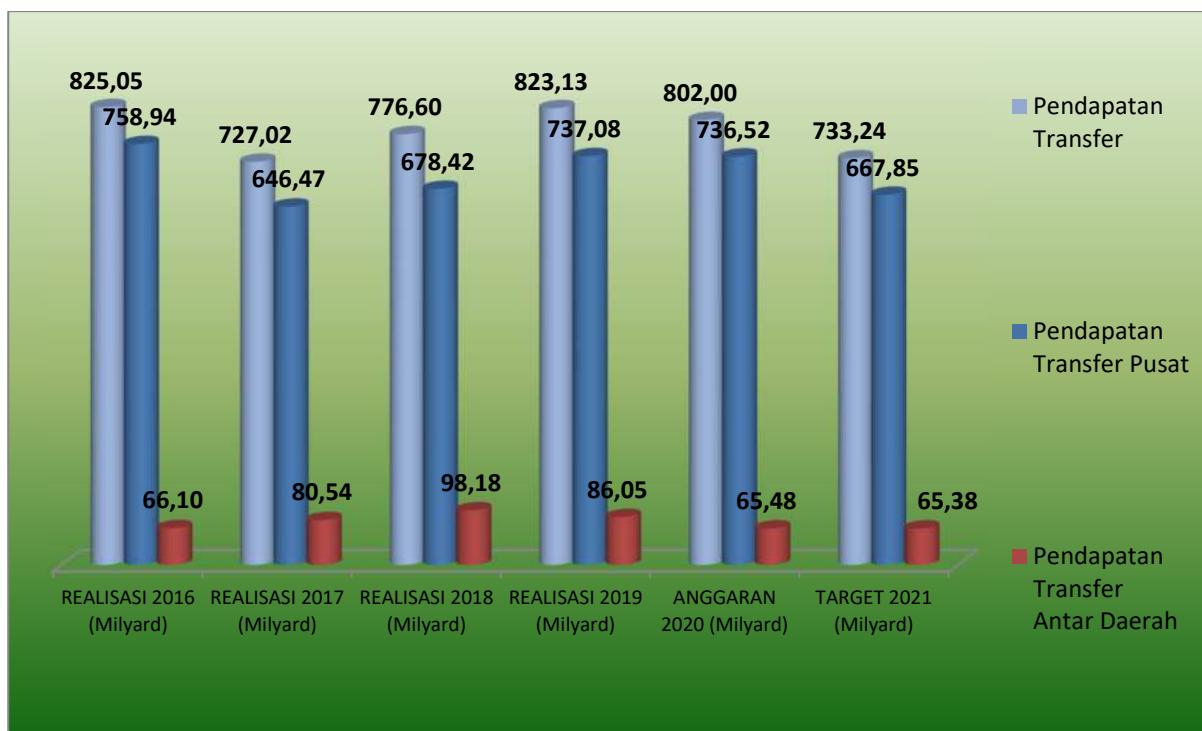
Gambar 2. 2.
Persentase Pertumbuhan PAD Kota Madiun
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021

Komponen Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penyumbang terbesar dalam penentuan besarnya tingkat pendapatan asli daerah, yaitu mencapai Rp 116.808.055.000,00 atau 50,16 % dari nilai PAD untuk Lain-Lain PAD yang Sah dan Rp. 85.000.000.000,00 atau 36,50 % dari nilai PAD untuk Pajak Daerah.

2.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

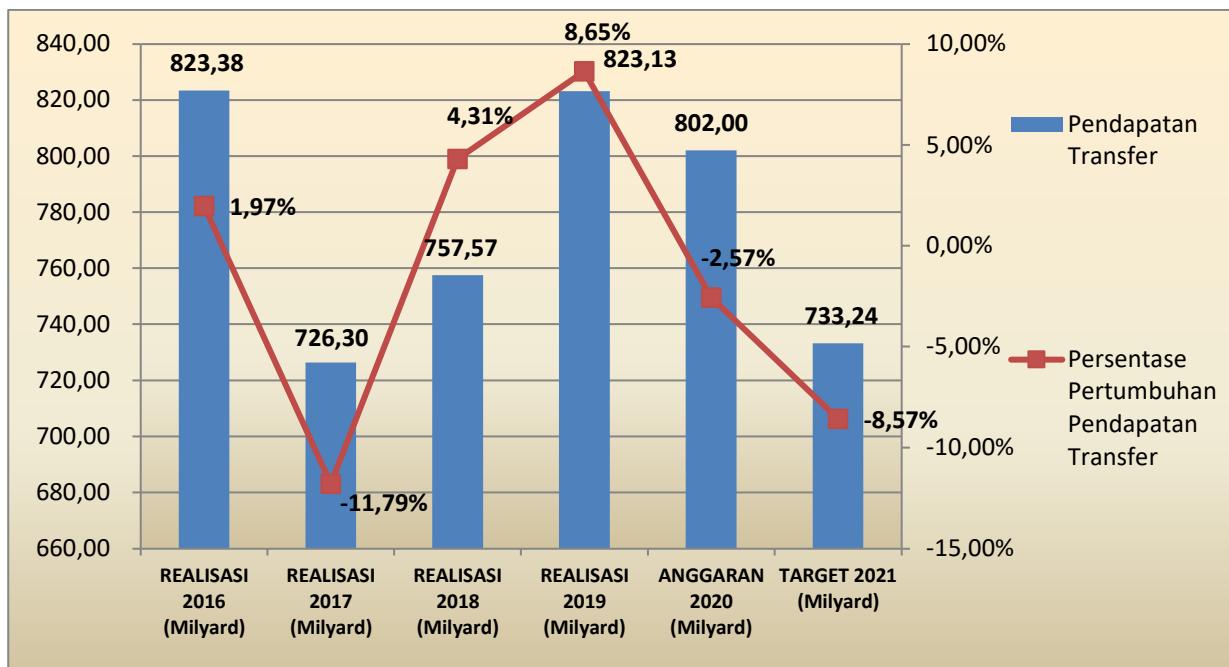
Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Transfer Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Otonomi Khusus) serta Dana Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya). Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Untuk tahun 2021 diproyeksikan sama dengan tahun anggaran 2020 (memang informasi resmi belum ada) sedangkan Dana Bagi Hasil Cukai diproyeksikan mengalami penurunan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020. Pendapatan Dana Transfer Antar Daerah diproyeksikan sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 (memang informasi resmi belum ada mengacu pada Perturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020).

Pendapatan Transfer Kota Madiun pada tahun 2021 diproyeksikan Rp. 733.238.206.000,00. Kontribusi Dana Alokasi Umum masih mendominasi komponen Pendapatan Transfer dengan Dana Alokasi Umum yang diproyeksikan sebesar Rp. 476.135.674.000,00 (asumsi sama dengan DAU tahun 2020 setelah refocusing dan realokasi yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020) sudah termasuk Dana Alokasi Umum Tambahan.



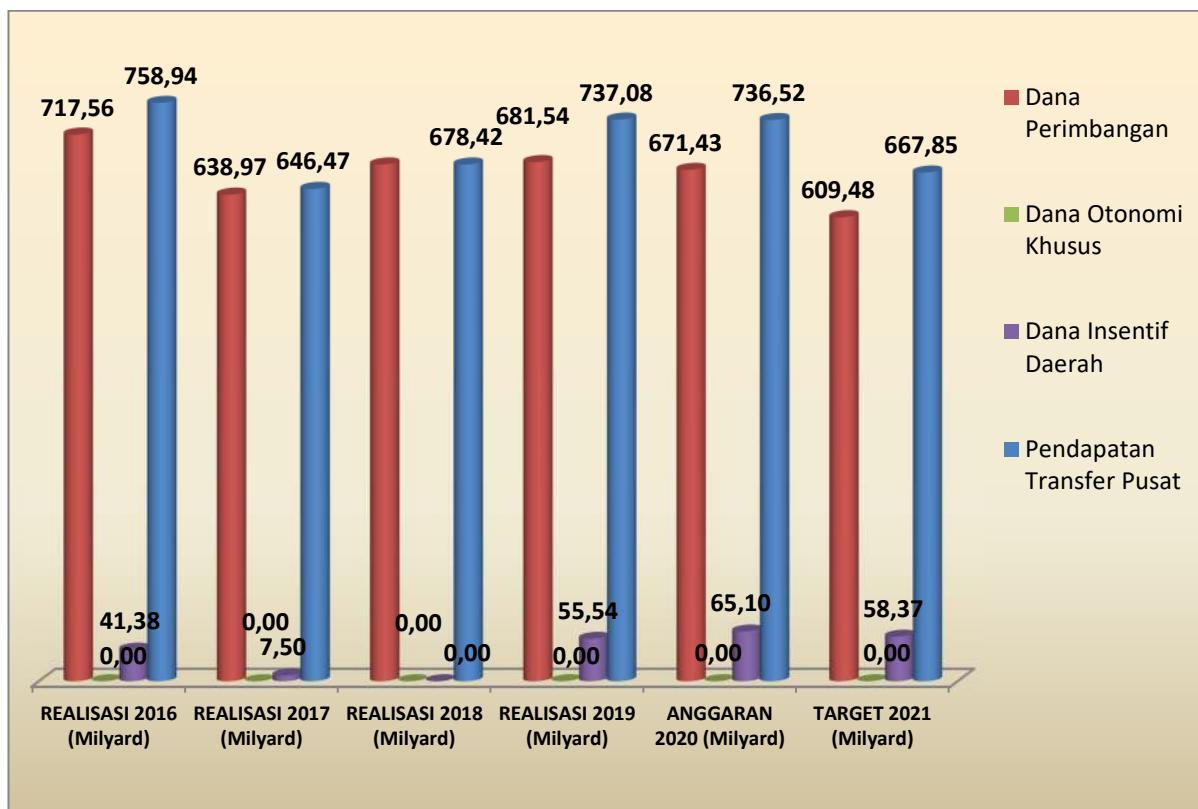
Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020, data diolah

**Gambar 2. 3.
Komponen Pendapatan Transfer
Kota Madiun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021**



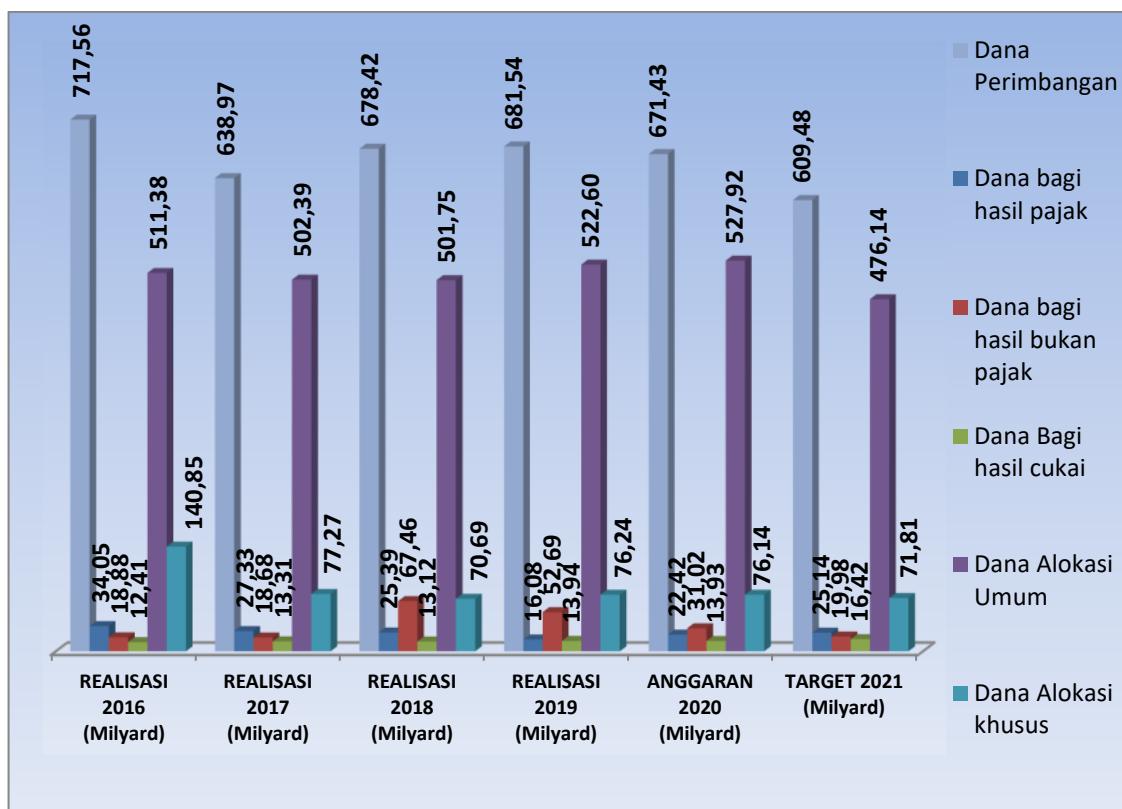
Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020, data diolah

Gambar 2. 4.
Percentase Pertumbuhan Pendapatan Transfer
Kota Madiun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021



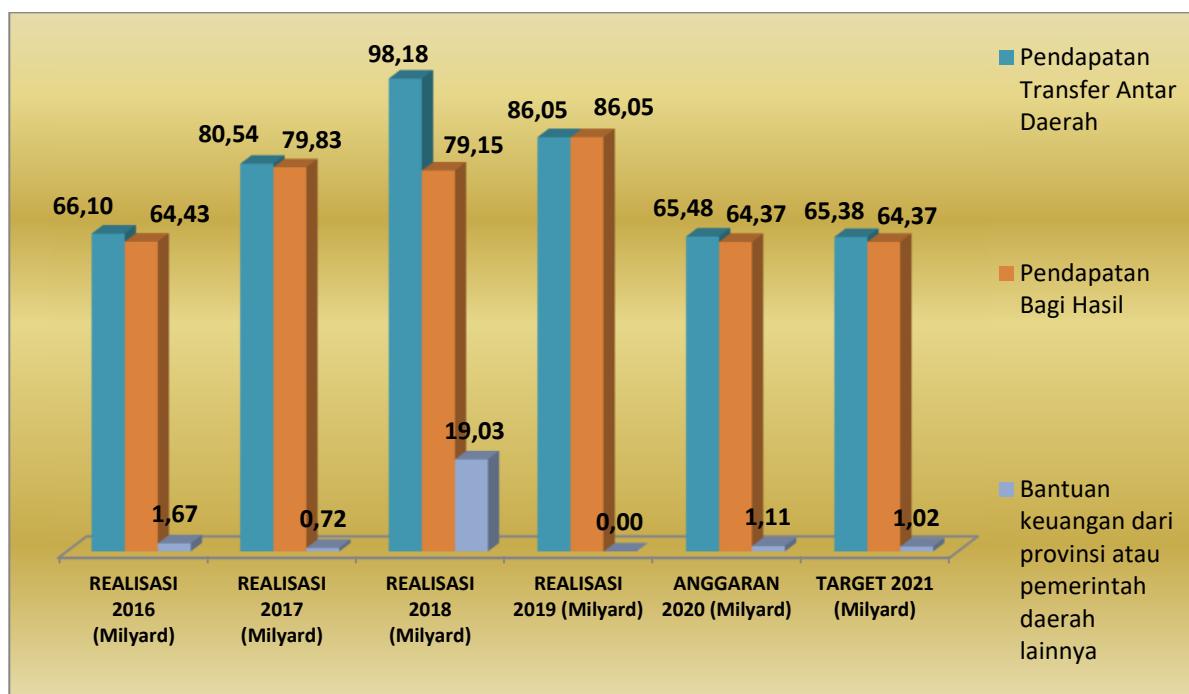
Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020, data diolah

Gambar 2. 5.
Komponen Pendapatan Transfer Pusat
Kota Madiun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020, data diolah

Gambar 2. 6.
Komponen Pendapatan Dana Perimbangan
Kota Madiun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021

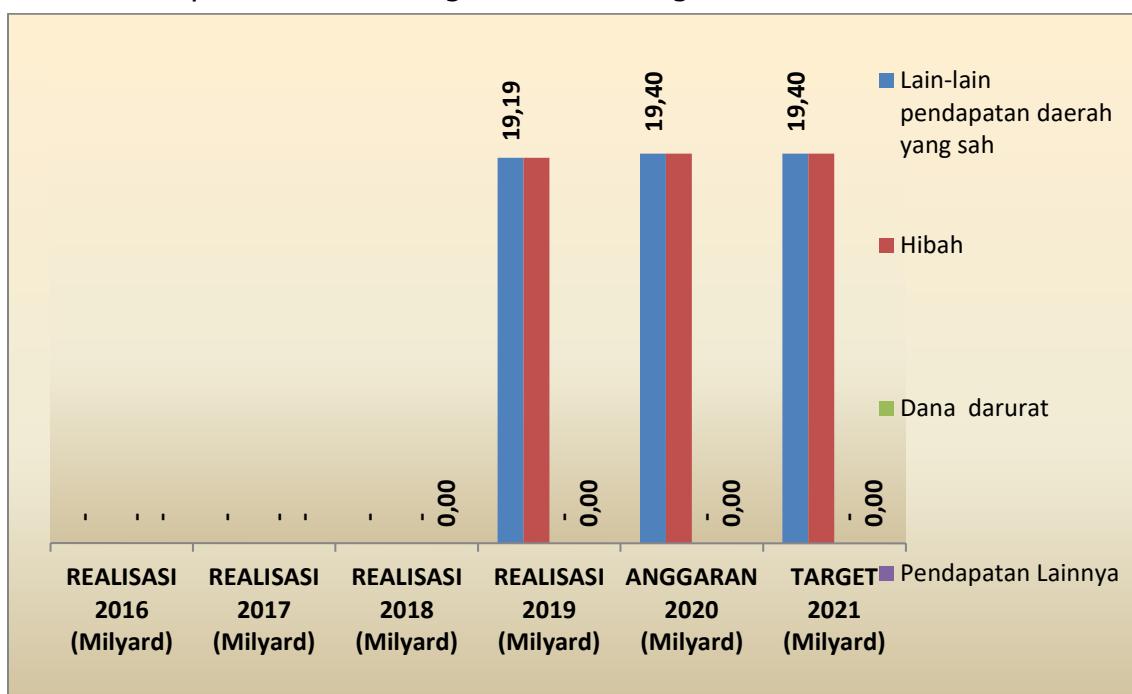


Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020, data diolah

Gambar 2. 7.
Komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah
Kota Madiun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021

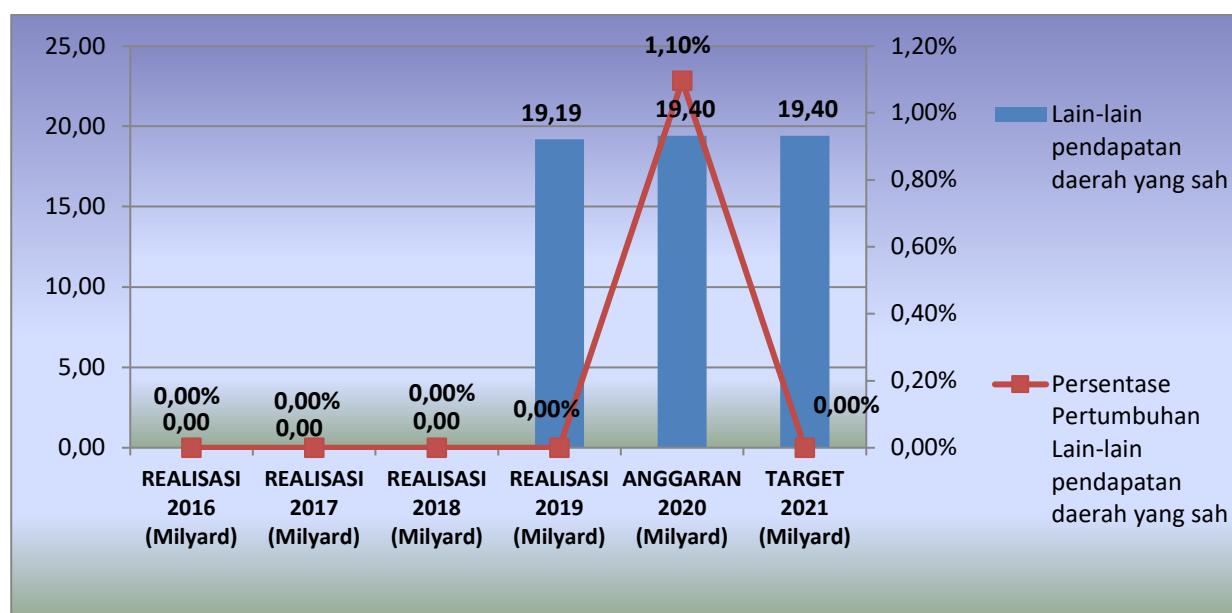
2.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Komponen penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, Dana Darurat serta Pendapatan Lainnya. Pada tahun 2021 proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Madiun sebesar Rp. 19.399.600.000,00 (asumsi sama dengan tahun sebelumnya), dimana komponen utamanya dana hibah yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sama dengan tahun 2020.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020, data diolah

**Gambar 2. 8
Komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kota Madiun
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021**



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020, data diolah

**Gambar 2. 9
Persentase Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kota Madiun
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021**

Secara rinci, proyeksi Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH		% Naik/Turun
		ANGGARAN 2020	TARGET 2021	
1	PENDAPATAN			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	235.504.941.000,00	232.856.453.140,00	-1,12%
1.1.1.	Pajak Daerah	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00	0,00%
1.1.2.	Retribusi Daerah	18.762.439.600,00	16.113.951.740,00	-14,12%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.934.446.400,00	14.934.446.400,00	0,00%
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	116.808.055.000,00	116.808.055.000,00	0,00%
1.2.	Pendapatan Transfer	802.001.763.000,00	733.238.206.000,00	-8,57%
1.2.1	Pendapatan Transfer Pusat	736.520.570.000,00	667.854.513.000,00	-9,32%
1.2.1.01	Dana Perimbangan	671.425.330.000,00	609.482.074.000,00	-9,23%
1.2.1.01.1	<i>Dana bagi hasil pajak</i>	22.423.248.000,00	25.144.766.000,00	12,14%
1.2.1.01.2	<i>Dana bagi hasil bukan pajak</i>	31.021.504.000,00	19.978.801.000,00	-35,60%
1.2.1.01.3	<i>Dana Bagi hasil cukai</i>	13.927.277.000,00	16.415.026.000,00	23,20%
1.2.1.01.4	<i>Dana Alokasi Umum</i>	527.916.797.000,00	476.135.673.000,00	-9,81%
1.2.1.01.5	<i>Dana Alokasi khusus</i>	76.136.504.000,00	71.807.808.000,00	-5,69%
1.2.1.02	Dana Insentif Daerah	65.095.240.000,00	58.372.439.000,00	-23,19%
1.2.1.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.481.193.000,00	65.383.693.000,00	-0,15%
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	64.366.614.000,00	64.366.614.000,00	0,00%
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.114.579.000,00	1.017.079.000,00	
1.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00	0,00%
1.3.1.	Hibah	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00	0,00%
1.3.2.	Dana darurat	0,00	0,00	
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.056.906.304.000,00	985.494.259.162,00	-6,76%
2.	BELANJA DAERAH			
2.1.	BELANJA OPERASI	988.597.081.181,00	920.440.004.156,00	-6,89%
2.1.1.	Belanja Pegawai	511.353.369.497,00	510.149.551.523,00	-0,24%
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.432.411.684,00	374.523.659.133,00	-14,96%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	
2.1.5	Belanja Hibah	15.562.452.000,00	13.309.367.000,00	-14,48%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	21.248.848.000,00	22.457.426.500,00	5,69%
2.2	BELANJA MODAL	286.003.429.024,00	191.302.646.309,00	-33,11%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	700.000.000,00	
2.1.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.948.919.338,00	53.039.617.816,00	-26,28%

KODE	URAIAN	JUMLAH		% Naik/Turun
		ANGGARAN 2020	TARGET 2021	
2.1.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.980.205.060,00	45.768.418.557,00	-18,24%
2.1.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	150.785.620.060,00	85.358.230.563,00	-43,39%
2.1.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.288.684.566,00	5.517.749.728,00	-24,30%
2.1.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	918.629.645,00	
2.3.	BELANJA TAK TERDUGA	3.562.209.000,00	1.000.000.000,00	-71,93%
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	3.562.209.000,00	1.000.000.000,00	-71,93%
2.4.	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00%
2.4.1.	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	0,00	0,00	0,00%
	JUMLAH BELANJA	1.278.162.719.205,00	1.112.742.650.465,00	-12,94%
	SURPLUS / (DEFISIT)	-221.256.415.205,00	-127.248.391.303,00	-42,49%
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	221.256.415.205,00	127.248.391.325,00	-42,49%
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	221.256.415.205,00	127.248.391.325,00	-42,49%
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	
3.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO	221.256.415.205,00	127.248.391.325,00	-42,49%
	SILPA	83.000.000,00	0,00	-100,00%

Sumber: BPKAD Kota Madiun2020, data diolah

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan Kota Madiun tahun 2021 berasal dari SILPA (Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya). Hal ini menyebabkan pada tahun 2020 target penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 127.248.391.325,00 juga berasal dari SILPA (Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya).

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kota Madiun yang tertuang dalam RKPD 2021 pada intinya mempertimbangkan (1) visi Kota Madiun dalam RPJMD (2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Timur; (3) isu-isu strategis daerah; dan (4) evaluasi capaian kinerja RKPD Kota Madiun tahun 2019. Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tujuan serta sasaran pembangunan sebagai akibat dampak pandemi covid 19, maka tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2021 adalah "***Pemulihhan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Ekonomi Lokal, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan serta Infrastruktur di Kota Madiun***".

Pengambilan tema ini didasarkan pada kondisi eksisting dan juga perencanaan ke depan Kota Madiun dimana semakin pentingnya kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang ditopang sumberdaya manusia atau tenaga kerja yang handal, pengembangan pariwisata serta pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan industri kecil dan menengah. Selain itu, Penyiapan sumberdaya manusia yang handal melalui pelayanan memuaskan di bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kota merupakan fokus dari tahun pertama RPJMD Kota Madiun 2019-2024.

Mengacu kepada prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun serta dengan memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Madiun, prioritas nasional serta prioritas provinsi, maka Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2021 menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan;**
- 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing;**
- 3. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata;**
- 4. Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah;**
- 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;**
- 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;**

Selanjutnya masing-masing Program di dalam prioritas pembangunan Daerah Kota Madiun disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur disesuaikan dengan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Madiun

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN
1	2	3	4
1	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	<i>Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan</i>
2	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Penguatan Konektivitas antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	
3	SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelegence (AI)	<i>Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualiatas SDM yang Berdaya Saing</i>
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal	<i>Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata</i>
5	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	<i>Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah</i>
6	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	<i>Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana</i>
7	Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	<i>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</i>

Tabel 3.1.
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Presentase kawasan bebas banjir/ genangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase Peningkatan Sampel Pangan yang Teruji (%)		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	Dinas Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan	
		Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rasio Pendapatan Usaha Perikanan (%)		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi pariwisata		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian (ton/ha)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan pengadaan prasarana (%)		
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan lahan aman bencana pertanian (%)		
		Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase Peningkatan jumlah SDM Pertanian terlatih (%)		
		Program Pengendalian Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan Jumlah Hewan dan Produk Asal Hewan yang Terawasi (%)		
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Prosentase Tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Program Pembinaan Industri (DBH-CHT)	Prosentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)		
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Prosentase IKM yang mengikuti pemasaran produk		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase Pendaftar Transmigrasi yang terfasilitasi	Dinas Penanaman Modal dan Transmigrasi		
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian/ Kajian yang dapat dimanfaatkan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
		Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial			
		Program Penanganan Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana			
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Prosentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			
		Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS yang tertangani			
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pengendalian Penduduk	Menurunnya angka UKP (usia kawin pertama) < 20 tahun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Menurunnya Unmeet Need			
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB			
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen kependudukan	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen Akta Pencatatan Sipil			
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Akurasi database kependudukan			
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase peningkatan kualitas SDM Kesehatan			
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Prosentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang tersertifikasi			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata			
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan (DBHCHT & BK Prov)	Persentase fasilitas kesehatan rumah sakit yang sesuai standar			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Rumah Sakit Umum Daerah		
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan rumah sakit yang sesuai standar			
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan		
		Program Pengembangan Kurikulum	terlaksananya standar isi, proses penilaian pendidikan			
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang Bersertifikat			
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	IDG	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase pelaksanaan kegiatan dalam upaya perlindungan perempuan			
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan dan penguatan pemenuhan hak anak			
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak			
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Prestasi Pemuda	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga			
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Tenaga Kerja		
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan (DBH - CHT)	Prosentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi nasional			
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Prosentase Pencari Kerja Yang ditempatkan			
		Program Hubungan Industrial	Prosentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial			
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Tenaga Kerja		
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif dengan omzet meningkat			
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro naik kelas			
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase investor yang merealisasikan investasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
1		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan wajib LKPM	Perindustrian dan Tenaga Kerja		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pengaduan pelayanan terselesaikan			
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase jenis izin yang diproses secara elektronik			
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah sarana distribusi perdagangan			
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah ketersediaan bahan pokok dan barang penting	Dinas Perdagangan		
		Program Standarisasi Perlindungan Konsumen	Jumlah alat yang telah distandarisasi			
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah pemasaran produk dalam negeri			
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan			
		Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal			
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan		
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan sesuai ketentuan perundang - undangan	Kecamatan Manguharjo		
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan sesuai ketentuan perundang - undangan	Kecamatan Kartoharjo		
4	Revolusi Mental	Program Kepegawaian Daerah	IKM Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia		
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kapasitas sesuai dengan keahlian dan kompetensi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia		
		Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan			
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indek Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan	5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Program Penataan Bangunan Gedung	Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi yang handal			
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan			
		Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase panjang jalan dalam kondisi baik			
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Kab/Kota	Prosentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan air tidak tersumbat			
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Presentase ketaatan tarhadap RT/RW			
		Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		
		Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	Prosentase Penanganan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh			
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang kartoharjo yang diprioritaskan dalam RKPD			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang kartoharjo yang diprioritaskan dalam RKPD	Kecamatan Kartoharjo		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang kartoharjo yang diprioritaskan dalam RKPD			
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	kepadatan lalu lintas (kend/km)			
			Prosentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan		
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase data Perencanaan LH yang tersedia			
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu			
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Prosentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
1		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)			
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	prosentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat			
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase penanganan dan pengaduan lingkungan hidup			
		Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga			
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Program Penanggulangan Kebakaran	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
7	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	
		Program Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE Administrasi Pemerintahan			
		Program Sosialisasi di Bidang Cukai	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai			
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indek Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum		
		Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak-hak Dewan	Sekretariat DPRD		
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD Terhadap Layanan Perundang-Undangan			
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase masyarakat yang memahami nilai-nilai Nasionalisme	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase pemahaman masyarakat dibidang politik			
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Orkemas Berbadan Hukum			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase koordinasi yang ditindaklanjuti		
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Konflik horisontal di dalam masyarakat		
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	

Tabel 3.2.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1 Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.537.044.700	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		8.972.715.400	
	Program Penanganan Bencana	Percentase Korban Bencana Yang Ditangani		502.390.000	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Prosentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		65.600.000	
	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS yang tertangani		1.493.190.300	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Percentase peningkatan pelembagaan dan penguatan pemenuhan hak anak		473.304.040	
	Program Perlindungan Khusus Anak	Percentase pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak		171.745.860	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	762.146.000	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase Peningkatan Sampel Pangan yang Teruji (%)		252.617.000	
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Percentase koperasi aktif	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Tenaga Kerja	750.310.000	
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Percentase koperasi aktif dengan omzet meningkat		148.050.000	
	Program Pengembangan UMKM	Percentase Usaha Mikro naik kelas		630.000.000	
	Program Promosi Penanaman Modal	Percentase investor yang merealisasikan investasi	Dinas Penanaman Modal dan Transmigrasi	373.118.200	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan wajib LKPM		154.325.000	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Percentase pengaduan pelayanan terselesaikan		373.640.000	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase jenis izin yang diproses secara elektronik		31.600.000	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	Dinas Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan	205.440.000	
	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rasio Pendapatan Usaha Perikanan (%)		434.150.000	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian (ton/ha)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.444.709.000	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
-	-	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan pengadaan prasarana (%)		35.729.000
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan lahan aman bencana pertanian (%)		145.877.000
		Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase Peningkatan jumlah SDM Pertanian terlatih (%)		139.166.000
		Program Pengendalian Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan Jumlah Hewan dan Produk Asal Hewan yang Terawasi (%)		372.200.000
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan	140.100.000
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah ketersediaan bahan pokok dan barang penting		79.724.000
		Program Standarisasi Perlindungan Konsumen	Jumlah alat yang telah distandarisasi		256.019.000
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah pemasaran produk dalam negeri		672.545.000
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan		5.316.229.000
		Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal		50.000.000
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Prosentase Tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Tenaga Kerja	550.151.320
		Program Pembinaan Industri (DBH-CHT)	Prosentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)		100.000.000
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Prosentase IKM yang mengikuti pemasaran produk		506.000.000
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indek Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	8.007.129.000
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan		483.733.600
		Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai		450.000.000
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi (DBHCHT)	Prosentase Kelompok Sosial Ekonomi Yang Difasilitasi		300.000.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	Penguatan Konektivitas antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur				
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)	Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	117.651.112.125
		Program Pengembangan Kurikulum	terlaksananya standar isi, proses penilaian pendidik		572.110.560
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang Bersertifikat	2.774.939.040	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	49.573.145.380
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase peningkatan kualitas SDM Kesehatan		209.036.000
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Prosentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang tersertifikasi		6.025.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata		797.168.000
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan (DBHCHT & BK Prov)	Persentase fasilitas kesehatan rumah sakit yang sesuai standar		7.499.090.000
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat		Rumah Sakit Umum Daerah
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	6.384.003.000	
		Program Pengendalian Penduduk	Menurunnya angka UKP (usia kawin pertama) < 20 tahun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Menurunnya Unmet Need		1.154.202.560
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribuna PUS yang ber-KB		950.876.080
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Tenaga Kerja	218.618.040
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan (DBH - CHT)	Prosentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi nasional		972.571.500
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Prosentase Pencari Kerja Yang ditempatkan		407.889.360

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal	Program Hubungan Industrial	Prosentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial		1.774.768.440
		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai IKM Pemustaka terhadap Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.607.750.000
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase Pendaftar Transmigrasi yang terfasilitasi	Dinas Penanaman Modal dan Transmigrasi	13.500.000
5	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Prestasi Pemuda	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	700.000.000
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga		4.324.197.280
		Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	3.250.000.000
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan		200.000.000
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan		200.000.000
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	375.000.000
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi pariwisata		1.058.050.000
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif		600.000.000
		Program Penataan Bangunan Gedung	Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.300.000.000
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi yang handal		500.000.000
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan		16.881.400.000
		Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase panjang jalan dalam kondisi baik		38.289.000.000
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Kab/Kota	Prosentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan air tidak tersumbat		15.500.000.000
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah titik/lokasi banjir		22.050.000.000
		Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1.187.450.000
		Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	Prosentase Penanganan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh		4.160.400.000
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		2.474.650.000
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	kepadatan lalu lintas (kend/km) Prosentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan	12.247.807.400

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
6	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Presentase ketataan tarhadap RT/RW	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.500.000.000
		Program Penanggulangan Kebakaran	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.066.231.000
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.194.469.000
		Program Penatagunaan Tanah	Prosentase Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	120.000.000
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase data Perencanaan LH yang tersedia	Dinas Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan	475.000.000
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu		1.350.000.000
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Prosentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		12.866.091.000
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)		100.000.000
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)		335.000.000
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	prosentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat		774.000.000
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase penanganan dan pengaduan lingkungan hidup		85.000.000
		Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		6.270.000.000
7	Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang diselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.072.977.000
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	IDG	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.430.375.920
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase pelaksanaan kegiatan dalam upaya perlindungan perempuan		293.522.360

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
-	-	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen kependudukan	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	239.453.120
		Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen Akta Pencatatan Sipil		457.121.760
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Akurasi database kependudukan		1.185.732.270
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.911.153.000
		Program Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE Administrasi Pemerintahan		9.013.353.000
		Program Sosialisasi di Bidang Cukai	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai		3.076.826.000
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	258.887.000
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	144.696.000
		Program Pengelolaan Arsip	Jumlah berkas arsip yang dikelola	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	436.354.240
		Program Administrasi Umum	IKM di bidang administrasi umum	Bagian Umum	2.276.966.380
		Program Administrasi Umum	IKM di bidang administrasi umum	Bagian Organisasi	1.450.350.720
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indek Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum	780.852.680
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	763.379.377
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indek Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan	1.865.261.581
		Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak-hak Dewan	Sekretariat DPRD	14.736.823.130
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD Terhadap Layanan Perundang-Undangan		14.889.860.930
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaannya sesuai ketentuan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.358.914.560
		Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Target Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		451.000.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Target Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		242.074.000
		Program Perencanaan Insfrastruktur dan Kewilayahana	Persentase Capaian Target Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahana		490.670.000
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	realiasasi kinerja yang memenuhi target	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.241.121.000
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kontribusi Pengelolaan Aset Terhadap PAD		337.189.040
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	Badan Pendapatan Daerah	695.305.000
		Program Kepegawaian Daerah	IKM Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	1.965.568.260
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kapasitas sesuai dengan keahlian dan kompetensi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	4.109.251.204
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian/ Kajian yang dapat dimanfaatkan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	867.119.600
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Inspektorat	2.199.162.000
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi		6.600.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang kartoharjo yang diprioritaskan dalam RKPD	Kecamatan Taman	3.365.638.726
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		129.344.640
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan sesuai ketentuan perundang - undangan		106.438.800
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pendeklegasian wewenang sesuai ketentuan		5.139.642.520
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pendeklegasian wewenang sesuai ketentuan	Kecamatan Manguharjo	6.208.462.650
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang kartoharjo yang diprioritaskan dalam RKPD		3.468.891.760
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		263.985.880

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan sesuai ketentuan perundang - undangan	Kecamatan Kartoharjo	181.926.494
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pendeklegasian wewenang sesuai ketentuan		5.552.902.400
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang kartoharjo yang diprioritaskan dalam RKPD		3.432.558.400
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		188.125.520
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan sesuai ketentuan perundang - undangan		172.079.360
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase masyarakat yang memahami nilai-nilai Nasionalisme	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	589.298.500
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase pemahaman masyarakat dibidang politik		921.058.100
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Orkemas Berbadan Hukum		222.985.000
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase koordinasi yang ditindaklanjuti		484.692.000
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Konflik horisontal di dalam masyarakat		953.198.050
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RUTIN)	Indeks RB	34 Perangkat Daerah	524.584.678.518

Tabel 3.3.
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MADIUN	SASARAN PRIORITAS	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan	a. Stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.537.044.700	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		8.972.715.400	
			Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS yang tertangani		1.493.190.300	
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Percentase peningkatan pelembagaan dan penguatan pemenuhan hak anak		473.304.040	
			Program Perlindungan Khusus Anak	Percentase pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak		171.745.860	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	762.146.000	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase Peningkatan Sampel Pangan yang Teruji (%)		252.617.000	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	Dinas Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan	205.440.000	
			Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rasio Pendapatan Usaha Perikanan (%)		434.150.000	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian (ton/ha)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.444.709.000	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan pengadaan prasarana (%)		35.729.000	
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan lahan aman bencana pertanian (%)		145.877.000	
			Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase Peningkatan jumlah SDM Pertanian terlatih (%)		139.166.000	
			Program Pengendalian Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan Jumlah Hewan dan Produk Asal Hewan yang Terawasi (%)		372.200.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MADIUN	SASARAN PRIORITAS	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
b.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Tenaga Kerja	750.310.000	-
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif dengan omzet meningkat		148.050.000	
			Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro naik kelas		630.000.000	
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan	140.100.000	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah ketersediaan bahan pokok dan barang penting		79.724.000	
			Program Standarisasi Perlindungan Konsumen	Jumlah alat yang telah standarisasi		256.019.000	
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah pemasaran produk dalam negeri		672.545.000	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan		5.316.229.000	
			Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal		50.000.000	
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Prosentase Tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Tenaga Kerja	550.151.320	
			Program Pembinaan Industri (DBH-CHT)	Prosentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)		100.000.000	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Prosentase IKM yang mengikuti pemasaran produk		506.000.000	
	c.	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase investor yang merealisasikan investasi	Dinas Penanaman Modal dan Transmigrasi	373.118.200	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan wajib LKPM		154.325.000	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pengaduan pelayanan terselesaikan		373.640.000	
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase jenis izin yang diproses secara elektronik		31.600.000	
			Program Pemerintahan dan	Indeks Kepuasan Masyarakat di	Bagian	8.007.129.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MADIUN	SASARAN PRIORITAS	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kesejahteraan Rakyat	Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan		483.733.600	
			Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai		450.000.000	
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi (DBHCHT)	Prosentase Kelompok Sosial Ekonomi Yang Difasilitasi		300.000.000	
2	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	117.651.112.125	- 32 -
			Program Pengembangan Kurikulum	terlaksananya standar isi, proses penilaian pendidik		572.110.560	
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang Bersertifikat		2.774.939.040	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai IKM Pemustaka terhadap Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.607.750.000	
		b. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	49.573.145.380	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase peningkatan kualitas SDM Kesehatan		209.036.000	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Prosentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang tersertifikasi		6.025.000	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata		797.168.000	
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan (DBHCHT & BK Prov)	Persentase fasilitas kesehatan rumah sakit yang sesuai standar		7.499.090.000	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Rumah Sakit Umum Daerah	78.968.581.550	
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan rumah sakit yang sesuai standar		6.384.003.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MADIUN	SASARAN PRIORITAS	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata	c. Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	Program Pengendalian Penduduk	Menurunnya angka UKP (usia kawin pertama) < 20 tahun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	178.991.280	33
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Menurunnya Unmet Need		1.154.202.560	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB		950.876.080	
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Tenaga Kerja	218.618.040	
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan (DBH - CHT)	Prosentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi nasional		972.571.500	
		a. Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Program Penempatan Tenaga Kerja	Prosentase Pencari Kerja Yang ditempatkan		407.889.360	
			Program Hubungan Industrial	Prosentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial		1.774.768.440	
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase Pendaftar Transmigrasi yang terfasilitasi	Dinas Penanaman Modal dan Transmigrasi	13.500.000	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Prestasi Pemuda	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	700.000.000	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga		4.324.197.280	
		b. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase seni budaya yang dilestarikan		3.250.000.000	
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan		200.000.000	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan		200.000.000	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	375.000.000	
			Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi pariwisata		1.058.050.000	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif		600.000.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MADIUN	SASARAN PRIORITAS	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah	a. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Sarana Transportasi Kota dan Permukiman	Program Penataan Bangunan Gedung	Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.300.000.000	- 34 -
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Percentase penyedia jasa konstruksi yang handal		500.000.000	
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan		16.881.400.000	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase panjang jalan dalam kondisi baik		38.289.000.000	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Kab/Kota	Prosentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan air tidak tersumbat		15.500.000.000	
			Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1.187.450.000	
			Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	Prosentase Penanganan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh		4.160.400.000	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		2.474.650.000	
		a. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	KEPADATAN LALU LINTAS (Kend/Km)	Dinas Perhubungan	12.247.807.400	
				Prosentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)			
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	a. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Prosentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65.600.000	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah titik/lokasi banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.050.000.000	
			Program Penatagunaan Tanah	Prosentase Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	120.000.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MADIUN	SASARAN PRIORITAS	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Presentase ketataan tarhadap RT/RW	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.500.000.000	
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase data Perencanaan LH yang tersedia	Dinas Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan	475.000.000	
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu		1.350.000.000	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Prosentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		12.866.091.000	
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)		100.000.000	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)		335.000.000	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	prosentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat		774.000.000	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase penanganan dan pengaduan lingkungan hidup		85.000.000	
			Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		6.270.000.000	
	b. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	502.390.000	
			Program Penanggulangan Kebakaran	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.066.231.000	
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani		1.194.469.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MADIUN	SASARAN PRIORITAS	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Percentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan		2.072.977.000	
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	a. Meingkatnya Tata Kelola Pemerintah	Program Pendaftaran Penduduk	Percentase penerbitan dokumen kependudukan	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	239.453.120	
			Program Pencatatan Sipil	Percentase penerbitan dokumen Akta Pencatatan Sipil		457.121.760	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Akurasi database kependudukan		1.185.732.270	
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Percentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.911.153.000	
			Program Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE Administrasi Pemerintahan		9.013.353.000	
			Program Sosialisasi di Bidang Cukai	Percentase Penyebaran Informasi tentang Cukai		3.076.826.000	
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Percentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	258.887.000	
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	144.696.000	
			Program Pengelolaan Arsip	Jumlah berkas arsip yang dikelola	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	436.354.240	
			Program Administrasi Umum	IKM di bidang administrasi umum	Bagian Umum	2.276.966.380	
			Program Administrasi Umum	IKM di bidang administrasi umum	Bagian Organisasi	1.450.350.720	
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indek Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum	780.852.680	
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	763.379.377	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MADIUN	SASARAN PRIORITAS	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indek Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan	1.865.261.581	
			Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak-hak Dewan	Sekretariat DPRD	14.736.823.130	
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD Terhadap Layanan Perundang-Undangan		14.889.860.930	
			Program Kepegawaian Daerah	IKM Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	2.165.568.260	
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kapasitas sesuai dengan keahlian dan kompetensi		4.109.251.204	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaannya sesuai ketentuan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.358.914.560	
			Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Target Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		451.000.000	
			Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Target Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		242.074.000	
			Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Target Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		490.670.000	
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian/ Kajian yang dapat dimanfaatkan		867.119.600	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan sesuai ketentuan perundang - undangan	Kecamatan Manguharjo	181.926.494	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan sesuai ketentuan perundang - undangan	Kecamatan Kartoharjo	172.079.360	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MADIUN	SASARAN PRIORITAS	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan sesuai ketentuan perundang - undangan	Kecamatan Taman	106.438.800	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	realisasi kinerja yang memenuhi target	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.241.121.000	
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kontribusi Pengelolaan Aset Terhadap PAD		337.189.040	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	Badan Pendapatan Daerah	695.305.000	
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Inspektorat	2.199.162.000	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi		6.600.000	
		c. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	IDG	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.430.375.920	
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase pelaksanaan kegiatan dalam upaya perlindungan perempuan		293.522.360	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang kartoharjo yang diprioritaskan dalam RKPD	Kecamatan Manguharjo	3.468.891.760	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang kartoharjo yang diprioritaskan dalam RKPD	Kecamatan Kartoharjo	3.432.558.400	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang kartoharjo yang diprioritaskan dalam RKPD	Kecamatan Taman	3.365.638.726	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pendeklegasian wewenang sesuai ketentuan	Kecamatan Manguharjo	6.208.462.650	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pendeklegasian wewenang sesuai ketentuan	Kecamatan Kartoharjo	5.552.902.400	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pendeklegasian wewenang sesuai ketentuan	Kecamatan Taman	5.139.642.520	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MADIUN	SASARAN PRIORITAS	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase masyarakat yang memahami nilai-nilai Nasionalisme	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	589.298.500	
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase pemahaman masyarakat dibidang politik		921.058.100	
		e. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Percentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kecamatan Manguharjo	263.985.880	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Percentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kecamatan Kartoharjo	188.125.520	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Percentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kecamatan Taman	129.344.640	
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Orkemas Berbadan Hukum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	222.985.000	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase koordinasi yang ditindaklanjuti		484.692.000	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Konflik horisontal di dalam masyarakat		953.198.050	
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RUTIN)	Indeks RB	34 Perangkat Daerah	524.584.678.518	

Tabel 3.4.
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Program	Target Capaian		
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
	1.01.02. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100%	1.01.02.2.01. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	terlaksananya 8 Standar Nasional Pendidikan	100%	1.01.02.2.01.08. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Lembaga yang direhab	20 lembaga	Dinas Pendidikan			
							1.01.02.2.01.16. Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Laptop	5.450 Laptop	Dinas Pendidikan			
							1.01.02.2.01.23. Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	56 lembaga	Kota Madiun			
							1.01.02.2.01.24. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksananya standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	73 Lembaga	Dinas Pendidikan			
							1.01.02.2.01.25. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	meningkatnya jumlah prestasi siswa akademik dan non akademik dalam 14 bidang kreatifitas	14 bidang kreatifitas bakat minat siswa	Dinas Pendidikan			
							1.01.02.2.01.28. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	73 Lembaga	Dinas Pendidikan			
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 03	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian
				Kartoharjo					
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Klegen	Jumlah Lembaga	1 Lembaga			
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Klegen	Jumlah Lembaga	1 Lembaga			
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Klegen	Jumlah Lembaga	1 Lembaga			
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Klegen	Jumlah Lembaga	1 Lembaga			
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga			
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Rejomulyo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga			
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Rejomulyo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga			
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kanigoro	Jumlah Lembaga	1 Lembaga			
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kanigoro	Jumlah Lembaga	1 Lembaga			
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kanigoro	Jumlah Lembaga	1 Lembaga			
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN Sukosari	Jumlah Lembaga	1 Lembaga			
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN Pilangbango	Jumlah Lembaga	1 Lembaga			
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Tawangrejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Tawangrejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN Kelun	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manguharjo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Winongo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Winongo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN Ngegong	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN Patihan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pangongangan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pangongangan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN Sogaten	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Taman	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Taman	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Taman	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pandean	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pandean	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN Banjarejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Mojorejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Mojorejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manisrejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Manisrejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Manisrejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Manisrejo	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Demangan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Demangan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Josenan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Josenan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Josenan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN Kejuron	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SDN Kuncen	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (DAK)	Jumlah Lembaga yang direhab	11 Lembaga							
				1.01.02.2.02. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	terlaksananya 8 Standar Nasional Pendidikan	100%	1.01.02.2.02.13. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Lembaga yang direhab	6 lembaga	Dinas Pendidikan			
							1.01.02.2.02.27. Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Kain	5.960 Kain seragam	Dinas Pendidikan			
							1.01.02.2.02.36. Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	14 lembaga	Kota Madiun			
							1.01.02.2.02.37. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	23 Lembaga	Dinas Pendidikan			
							1.01.02.2.02.38. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	meningkatnya jumlah prestasi siswa akademik dan non akademik dalam 14 bidang kreatifitas	14 bidang kreatifitas bakat minat siswa	Dinas Pendidikan			
							1.01.02.2.02.41. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	100 Lembaga	Dinas Pendidikan			
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 1	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 2	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 3	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 4	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				X.XX.XX.X.XX. Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14	Jumlah Lembaga	1 Lembaga							
				1.01.02.2.03. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar PAUD	100%	1.01.02.2.03.13. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah lembaga yang beroperasional dengan baik	1 lembaga	Dinas pendidikan			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							1.01.02.2.03.16. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Lembaga yang memahami kurikulum PAUD	169 Lembaga	Dinas pendidikan			
							1.01.02.2.03.17. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga yang sesuai dengan aturan yang berlaku	230 Lembaga	Dinas pendidikan			
				1.01.02.2.04. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang terakreditasi	100 lembaga	1.01.02.2.04.12. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Lulus Ujian	175 siswa	Dinas pendidikan			
							1.01.02.2.04.15. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Jumlah peserta yang memahami workshop pengelola Perpustakaan dan mulok Bahasa Jawa	96 Lembaga	Dinas pendidikan			
							1.01.02.2.04.16. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal /Kesetaraan	Jumlah Lembaga yang sesuai dengan aturan yang berlaku	165 Lembaga	Dinas pendidikan			
	1.01.03. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	terlaksananya standar isi, proses penilaian pendidik	100%	1.01.03.2.01. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	terlaksananya kurikulum di satuan pendidikan	100%	1.01.03.2.01.04. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan	96 Lembaga	Dinas Pendidikan			
	1.01.04. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase tenaga pendidik yang bersertifikasi	80%	1.01.04.2.01. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Persentase tenaga pendidik yang bersertifikasi	80%	1.01.04.2.01.01. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM Guru dan tenaga kependidikan	720 orang	Dinas Pendidikan			
							1.01.04.2.01.02. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya guru, Kepala sekolah, pengawas berprestasi dan kompetensi	2.147 orang	Dinas Pendidikan			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
	1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	0,39	1.02.02.2.01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	100%	1.02.02.2.01.16. Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Obat kadaluarsa < 1%	1 %	Dinas Kesehatan dan KB			
					Persentase fasilitas kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	91,13%	1.02.02.2.01.08. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab dan dipelihara	3 unit	RSUD Kota Madiun			
							1.02.02.2.01.14. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	20 jenis	RSUD Kota Madiun			
				1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPM mencapai target	100%	1.02.02.2.02.01. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan kunjungan ibu hamil paripurna	100%	Dinkes dan KB			
							1.02.02.2.02.04. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase imunisasi rutin lengkap	93%	Ruang Kelas Asrama Haji Kota Madiun			
								Cakupan kunjungan balita paripurna	100%				

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							1.02.02.2.02.06. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	Gedung diklat & asrama haji, 6 puskesmas, Latketmas murnajati,Din kes dan KB			
							1.02.02.2.02.08. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	Asrama haji , gedung diklat,Sunday Market			
							1.02.02.2.02.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Percentase SPM indikator Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis mencapai target	100%	Fasyankes, Lapas, Dinkes, Kecamatan			
							1.02.02.2.02.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Percentase SPM indikator Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV mencapai target	100%	Fasyankes, Lapas, Cafe, Dinkes, Kecamatan			
								Percentase penyakit menular dan tidak menular yang angka kesakitan dan kematian menurun, indikator terdiri dari :					
								Angka kesakitan DBD (Insidence Rate DBD)					
								Case Fatality Rate DBD					
								Kasus Malaria yang ditemukan dan diobati dengan ACT					
								Percentase RFT Rate					

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
								Persentase cakupan Pneumonia balita ditemukan dan ditangani					
								Persentase cakupan Diare balita ditemukan dan ditangani					
								Persentase bayi yang lahir dari bumiil HBsAg positif diberi HBIG					
						1.02.02.2.02.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi stunting	9,70%	Dinkes dan KB				
						1.02.02.2.02.16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pekerja yang dilayani	40%	Dinkes & KB				
						1.02.02.2.02.17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase TTU Sehat	85%	Dinkes & KB				
						1.02.02.2.02.20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase respon KLB < 24 jam	100%	Ruang Kelas Asrama Haji Kota Madiun, Ruang Pertemuan Dinas Kesehatan dan KB				
						1.02.02.2.02.22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	100%	Gedung diklat & asrama haji, 6 Puskesmas,Sunday market				

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		
							1.02.02.2.02.25. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penyakit menular dan tidak menular yang angka kesakitan dan kematian menurun	62.5% (PTM) 100% (P2M)	Gedung diklat & asrama haji, dinkes dan KB	
							1. Jumlah Puskesmas yang melakukan deteksi dini faktor resiko PTM $\geq 80\%$ populasi usia ≥ 15 tahun				
							2. Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di $\geq 80\%$ Puskesmas				
							3. Presentase kelurahan yang memiliki 3 posbindu PTM				
							4. Jumlah Puskesmas yang melakukan deteksi dini penyakit kanker di $> 10\%$ populasi usia 30-50 tahun				
							Angka kesakitan DBD (Incidence Rate DBD)	100%	Fasyankes, Dinkes, Kelurahan		
							Case Fatality Rate DBD				
							Kasus Malaria yang ditemukan dan diobati dengan ACT				
							Persentase RFT Rate				

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
								Persentase cakupan Pneumonia balita ditemukan dan ditangani					
								Persentase cakupan Diare balita ditemukan dan ditangani					
								Persentase bayi yang lahir dari bumiil HBsAg positif diberi HBIG					
						1.02.02.2.02.26. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (APBD dan DBHCHT)	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	88.966 orang	Kota Madiun				
						1.02.02.2.02.28. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Persentase kasus potensial KLB konfirmasi lab	Sesuai Kasus	BBLK Surabaya				
						1.02.02.2.02.29. Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Kelurahan yg melaksanakan tatanan wajib dan pilihan	60%	Dinkes & KB				
						1.02.02.2.02.33. Operasional Pelayanan Puskesmas (UKK dan BLUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,99 IKM	puskesmas				
						1.02.02.2.02.34. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	terlaksananya pelayanan gawat darurat	100%	PSC, P3K				
					Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100%	1.02.02.2.02.32. Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit	100%	RSUD Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (Bk Prov)	Persentase terbentuknya Posyandu PURI menjadi Taman Posyandu	41 %							
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (Bk Prov)	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	1 dokter							
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK)	Persentase SPM yang mencapai Target	100 %							
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK)	Jumlah Puskesmas yang Dilakukan Monitoring Evaluasi	6 puskesmas							
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makan (DAK)	Jumlah sarana farmasi dan IRT yang terpantau	70 sarana							
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan (DAK)	Persentase kegiatan penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana fasilitas pelayanan kesehatan terlaksana	100 %							
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas	Persentase SPM Puskesmas mencapai	100 %							

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				Manguharjo (DAK)	target								
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Patihan (DAK)	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	100 %							
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Demangan (DAK)	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	100 %							
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Banjarejo (DAK)	Persentase SPM puskesmas mencapai target	100 %							
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Oro-oro Ombo (DAK)	Persentase SPM puskesmas mencapai target	100 %							
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tawangrejo (DAK)	Persentase SPM puskesmas mencapai target	100 %							
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Persentase Obat kadaluarsa < 1%	1 %							

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Program	Target Capaian		
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	1.02.04. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang tersertifikasi	85%	1.02.04.2.03. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) Baru yang mendapat Sertifikat Produksi Pangan dan Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang mendapat No.P-IRT	85%	1.02.04.2.03.01. Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase IRT yang sehat	85%	Dinkes & KB			
	1.02.03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kualitas SDM Kesehatan	90%	1.02.03.2.04. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	92%	1.02.03.2.04.01. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya kesehatan yang sesuai standar	92 %	Dinkes & KB			
	1.02.05. PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	57,14%	1.02.05.2.01. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1	1.02.05.2.01.01. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Persentase Keluarga Sehat	68%	Dinas Kesehatan dan KB			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				1.02.05.2.03. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase UKBM aktif	42,86%	1.02.05.2.03.01. Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Percentase Puskesmas membina UKBM sesuai standar	33,33%	Dinas Kesehatan dan KB			
	x.xx.xx. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	91,13%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (DBHCHT)	Jumlah sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang diadakan	2 jenis				RSUD Kota Madiun			
		Persentase Penduduk Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	97%	x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT)	Percentase sarana / prasarana fasilitas kesehatan yang layak pakai	100%							
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Manguharjo (DBHCHT)	Nilai PKP Puskesmas	90 %							
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Patihan (DBHCHT)	Nilai PKP Puskesmas	88 %							

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Demangan (DBHCHT)	Nilai PKP Puskesmas	87 %							
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Banjarejo (DBHCHT)	Nilai PKP Puskesmas	93 %							
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Oro-Oro Ombo (DBHCHT)	Nilai PKP Puskesmas	86 %							
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Tawangrejo (DBHCHT)	Nilai PKP Puskesmas	90 %							
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (Bk Prov)	Persentase Poskestren berstrata PURI	70 %							
	1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	1.03.08. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung sesuai Ketentuan		1.03.08.2.01. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	1.03.08.2.01.01. Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan BangunanGedung, serta Implementasi SIMBG			Kota Madiun			
							1.03.08.2.01.02. Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan rehabilitasi, renovasi, Ubahsuai, serta pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota			Kota Madiun			
	1.03.11. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyediaan Jasa Konstruksi yang Handal		1.03.11.2.01. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta sosialisasi	100%	1.03.11.2.01.04. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta sosialisasi	100%	Kota Madiun			
							1.03.11.2.01.07. Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	Jumlah Perusahaan	100%	Kota Madiun			
	1.03.09. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan		1.03.09.2.01. Kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kab/kota	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	1.03.09.2.01.03. Penataan bangunan dan lingkungan	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	Kota Madiun			
	1.03.10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik		1.03.10.2.01. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kab/ Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	95%	1.03.10.2.01.01. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis sistem pengembangan jalan	Jumlah dokumen yang disusun	95%	Kota Madiun			
							1.03.10.2.01.02. Pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan jalan	Jumlah Lokasi yang yg dibebaskan	95%	Kota Madiun			
							1.03.10.2.01.04. Survey Kondisi Jalan/Jembatan						

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							1.03.10.2.01.05. Pembangunan jalan						
							1.03.10.2.01.06. Pelebaran jalan Menuju Standar	Presentase panjang jalan dalam kondisi baik	95%	Kota Madiun			
							1.03.10.2.01.07. Pelebaran Jalan Menambah Lajur						
							1.03.10.2.01.09. Rehabilitasi Jalan	Presentase panjang jalan dalam kondisi baik	95%	Kota Madiun			
							1.03.10.2.01.10. Pemeliharaan berkala jalan	Presentase panjang jalan dalam kondisi baik	95%	Kota Madiun			
							1.03.10.2.01.11. Pemeliharaan rutin jalan	Presentase panjang jalan dalam kondisi baik	95%	Kota Madiun			
							1.03.10.2.01.16. Penggantian Jembatan	Jumlah jembatan yg dibangun	95%	Kota Madiun			
							1.03.10.2.01.19. Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yg dibangun	95%	Kota Madiun			
	1.03.06. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE KAB/KOTA	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan air tidak tersumbat		1.03.06.2.01. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	Persentase kawasan bebas banjir/ genangan	94%	1.03.06.2.01.01. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis sistem drainase perkotaan	Presentase kawasan bebas banjir/ genangan	94%	Kota Madiun			
							1.03.06.2.01.05. Pembangunan saluran sistem drainase perkotaan dan lingkungan	Presentase kawasan bebas banjir/ genangan	94%	Kota Madiun			
							1.03.06.2.01.09. Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase	Presentase kawasan bebas banjir/ genangan	94%	Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Program	Target Capaian		
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	1.03.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Jumlah Titik/ Lokasi Banjir		1.03.02.2.01. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai atau WS dalam satu daerah kab/kota	Presentase kawasan bebas banjir/ genangan	94%	1.03.02.2.01.24. Rehabilitasi Tanggul Sungai	Presentase kawasan bebas banjir/ genangan	94%	Kota Madiun			
							1.03.02.2.01.55. Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Presentase kawasan bebas banjir/ genangan	94%	Kota Madiun			
	1.03.12. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase ketaatan tarhadap RT/RW	100%	1.03.12.2.01. Penetapan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) Kota/ Kab	jumlah dokumen	100%	1.03.12.2.01.01. Pelaksanaan, persetujuan, substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kab/ Kota	jumlah dokumen	100%	Kota Madiun			
				1.03.12.2.04. Koordinasi dan singkronisasi pengendalian pemanfaatan Ruang daerah Kab/ Kota			1.03.12.2.04.02. Koordinasi dan singkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan Ruang	jumlah dokumen					
				1.03.12.2.03. Koordinasi dan singkronisasi pemanfaatan Ruang daerah Kab/ Kota			1.03.12.2.03.01. Koordinasi dan singkronisasi pemanfaatan Ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	jumlah dokumen					
	1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Program	Target Capaian		
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	1.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	100%	1.04.02.2.01. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	2 dokumen	1.04.02.2.01.06. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen rumah sewa milik masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus yang dihasilkan	2 dokumen	Kota Madiun			
				1.04.02.2.05. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah lokasi Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 lokasi	1.04.02.2.05.02. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah lokasi Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 lokasi	Kota Madiun			
	1.04.03. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	20%	1.04.03.2.02. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani	1 lokasi	1.04.03.2.02.01. Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh yang dihasilkan	1 dokumen	Kota Madiun			
							1.04.03.2.02.02. Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh yang dihasilkan	6 dokumen	Kota Madiun			
				1.04.03.2.03. Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani	3 lokasi	1.04.03.2.03.02. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang dilakukan perbaikan terhadap RTLH yang sesuai kriteria	100%	Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							1.04.03.2.03.03. Kerjasama Perbaikan Rumah yang dilakukan perbaikan terhadap PSU Rumah yang sesuai kriteria	Persentase PSU Rumah yang dilakukan perbaikan terhadap PSU Rumah yang sesuai kriteria	100%	Kota Madiun			
	1.04.04. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	3 kecamatan	1.04.04.2.01.02. Penyediaan Prasarana,sarana dan utilitas umum diperumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah lokasi Prasarana,sarana dan utilitas umum yang disediakan	3 kecamatan	Kota Madiun			
							1.04.04.2.01.03. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	Kota Madiun			
	1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
	1.05.02. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan	96%	1.05.02.2.01. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	96%	1.05.02.2.01.01. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	Wilayah Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							1.05.02.2.01.02. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada yang tertangani	96%	Wilayah Kota Madiun			
							1.05.02.2.01.03. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peserta koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	90%	Satuan Polisi Pamong Praja			
							1.05.02.2.01.04. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	92%	Wilayah Kota Madiun			
							1.05.02.2.01.05. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Damkar yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM	Persentase SDM Satpol Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Damkar yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM	80%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar			
				1.05.02.2.02. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100%	1.05.02.2.02.01. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase peserta yang paham Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	100%	Wilayah Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							1.05.02.2.02.03. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota yang tertangani	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota yang tertangani	100%	Wilayah Kota Madiun			
	1.05.04. PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	1.05.04.2.01. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.05.04.2.01.01. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	80%	Wilayah Kota Madiun			
							1.05.04.2.01.02. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	Wilayah Kota Madiun dan sekitarnya			
				1.05.04.2.02. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Kegiatan Inspeksi proteksi kebakaran	90%	1.05.04.2.02.01. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran yang didata	Persentase Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran yang didata	90%	Wilayah Kota Madiun			
	1.05.03. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100%	1.05.03.2.01. Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Dokumen yang telah disusun	100%	1.05.04.2.01.02. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Persentase peserta yang hadir	100 %	BPBD Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				1.05.03.2.02. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100 %	1.05.03.2.02.02. Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	Persentase peserta yang hadir	100 %	BPBD Kota Madiun			
							1.05.03.2.02.03. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah pengadaan sarana dan prasaranra	1 Paket	BPBD Kota Madiun			
							1.05.03.2.02.06. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah peserta yang terlatih	50 Orang	Kota Madiun			
							1.05.03.2.02.07. Penanganan Pascabencana	Jumlah dokumen pendataan korban pasca bencana	1 Dokumen	BPBD Kota Madiun			
							1.05.03.2.02.08. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Piket Siaga Bencana	730 Shift	BPBD Kota Madiun			
	1.06. URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL												
	1.06.02. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	100%	1.06.02.2.03. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang berpotensi untuk dikembangkan	7	1.06.02.2.03.01. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang mengikuti pelatihan/pembinaaa n untuk meningkatkan kemampuan	135 orang	Dinsos PPPA			
							1.06.02.2.03.02. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS yang didampingi oleh tenaga TKSK	80 orang	Dinsos PPPA			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							1.06.02.2.03.03. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah siswa yang mengikuti sarasehan	115 orang	Dinsos PPPA			
							1.06.02.2.03.04. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (tambah Bansos)	Jumlah PSKS kelembagaan masyarakat yang mendapatkan pembinaan	5 Lembaga	Dinsos PPPA			
	1.06.05. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90%	1.06.05.2.01. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	90%	1.06.05.2.01.01. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar didata	24 orang	Kelurahan			
							1.06.05.2.01.02. Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar di rujuk	24 orang	Kota Madiun			
							1.06.05.2.01.03. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dipantau	24 orang	Kelurahan			
				1.06.05.2.02. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	1.06.05.2.02.01. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir miskin yang di data	10.000 orang	Kelurahan			
							1.06.05.2.02.02. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan bansos	10.000 orang	Kelurahan			

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Program	Target Capaian		
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	1.06.06. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100%	1.06.06.2.01. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang handal	100%	1.06.06.2.01.01. Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan makanan	3.300 orang	Kota Madiun			
							1.06.06.2.01.02. Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan sandang	1.000 orang	Kota Madiun			
							1.06.06.2.01.05. Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan psikososial	300 orang	Kota Madiun			
				1.06.06.2.02. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase terbentuknya kelurahan tanggap bencana	100%	1.06.06.2.02.01. Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana	60 orang	Kota Madiun			
							1.06.06.2.02.02. Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana yang mendapatkan sosialisasi	20 orang	Kota Madiun			
	1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	100%	1.06.04.2.01. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti sosial	Persentase PMKS terlantar yang tertangani	100%	1.06.04.2.01.01. Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan pangannya	155 orang	Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							1.06.04.2.01.02. Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan sandangnya	10 orang	Shelter Srindit			
							1.06.04.2.01.03. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu	9 orang	Kota Madiun			
							1.06.04.2.01.04. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi	10 orang	Kota Madiun			
							1.06.04.2.01.05. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta pertemuan PPDKM, FKKADK dan hari jadi disabilitas anak	500 orang	Kota Madiun			
							1.06.04.2.01.06. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis, dan Masyarakat	Jumlah keluarga PMKS yang mendapatkan bimbingan sosial	10 orang	Kota Madiun			
							1.06.04.2.01.10. Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS yang terlayani	10 orang	Kota Madiun			
				1.06.04.2.02. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	415 orang	1.06.04.2.02.04. Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS lainnya yang terlayani	10 orang	Kota Madiun			
							1.06.04.2.02.05. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS lainnya yang tercukupi kebutuhan sandangnya	7 orang	Kota Madiun			
							1.06.04.2.02.02. Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu	10 orang	Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							1.06.04.2.02.07. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	10 orang	Kota Madiun			
							1.06.04.2.02.12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi	10 orang	Kota Madiun			
	1.06.07. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	1.06.07.2.01. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Taman Makam Pahlawan Nasional yang dilakukan pemeliharaan	1 lokasi	1.06.07.2.01.02. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan	1 lokasi	Taman Makam Pahlawan			
	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
	2.07.03. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tersedianya peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten	285 orang	2.07.03.2.01. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja Yang ditempatkan	79%	2.07.03.2.01.01. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten bagi pencari kerja dan wirausaha baru	30 orang	Dinas Tenaga Kerja			
							2.07.03.2.01.02. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	20 Lembaga	Dinas Tenaga Kerja			

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Program	Target Capaian		
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	2.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang ditempatkan	79%	2.07.04.2.03. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan didalam Negeri maupun diLuar Negeri	500 orang	2.07.04.2.03.01. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersediannya data ketenagakerjaan atau Pengangguran	1 dokumen	Dinas Tenaga Kerja			
							2.07.04.2.03.02. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan Sosialisasi Bursa Kerja	500 orang	Dinas Tenaga Kerja			
							2.07.04.2.03.03. Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	75 orang	Dinas Tenaga Kerja			
	2.07.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	70%	2.07.05.2.01. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mengesahkan PP dan PKB	25%	2.07.05.2.01.01. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah dokumen peraturan ketenagakerjaan	15 dokumen	Dinas Tenaga Kerja			
							2.07.05.2.01.03. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sosialisasi Sarana HI dan Jumlah Tenaga kerja Sektor Informal yang mendapatkan SIAGAKITA	300 Perusahaan dan 36.000 tenaga kerja sektor informal	Dinas Tenaga Kerja			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				2.07.05.2.02. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan HI	100 perusahaan	2.07.05.2.02.02. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan melalui PB	15 kasus/ pengaduan	Dinas Tenaga Kerja			
	x.xx.xx. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan	Persentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi nasional	81%	x.xx.xx.x.xx. Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBH - CHT)	Jumlah peserta pelatihan pelatihan ketrampilan yang berkompeten bagi pencari kerja dan wirausaha baru	200 orang							
	2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
	2.08.02. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	IDG	83,25	2.08.02.2.01. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	13,32%	2.08.02.2.01.01. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah peserta pertemuan	100 orang	Dinas Sosial, PP dan PA			
							2.08.02.2.01.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor	350 orang	Dinas Sosial, PP dan PA			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							2.08.02.2.01.03. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta review	68 orang	Dinas Sosial, PP dan PA			
							2.08.02.2.01.04. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	Dinas Sosial, PP dan PA			
				2.08.02.2.02. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	92%	2.08.02.2.02.01. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Jumlah kegiatan Monev P3EL dan pertemuan Poksus	440 orang	6 kelurahan dan Dinas Sosial, PP dan PA			
							2.08.02.2.02.02. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Jumlah peserta lomba, pelatihan dan pertemuan rutin	8173 orang	3 kelurahan dan Dinas Sosial, PP dan PA			
				2.08.02.2.03. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	48,34%	2.08.02.2.03.01. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor	650 orang	Dinas Sosial, PP dan PA			
							2.08.02.2.03.02. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan forum	580 orang	Dinas Sosial, PP dan PA			
							2.08.02.2.03.03. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan	Jumlah pameran yang diikuti dan jumlah peserta pertemuan	1 kegiatan / 528 orang	Luar Kota Madiun dan Dinas Sosial, PP dan PA			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						
	2.08.06. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan dan penguatan pemenuhan hak anak	100%	2.08.06.2.01. Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pertemuan gugus tugas	100%	2.08.06.2.01.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemua gugus tugas tingkat kota/kec/kel	150 orang	Kota Madiun			
				2.08.06.2.02. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	100%	2.08.06.2.02.01. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan pernikahan dini	175 orang	Kota Madiun			
							2.08.06.2.02.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan FAKOM yang dilaksanakan	8 kegiatan	Kota Madiun			
							2.08.06.2.02.03. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersedia	1 dokumen	Kota Madiun			
							2.08.06.2.02.04. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah peserta Sosialisasi Ramah Anak	170 orang	Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							Kabupaten/Kota						
	2.08.03. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pelaksanaan kegiatan dalam upaya perlindungan perempuan	100%	2.08.03.2.01. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100%	2.08.03.2.01.01. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi tindak kekerasan terhadap perempuan	120 orang	Kota Madiun			
							2.08.03.2.01.02. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelaksanaan goes to village	165 orang	Kota Madiun			
				2.08.03.2.02. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan layanan bagi perempuan korban kekerasan	100%	2.08.03.2.02.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan, Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan tim jejaring/stakeholder	35 orang	Kota Madiun			
				2.08.03.2.03. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang terlayani kebutuhan spesifikasinya dalam situasi darurat	100%	2.08.03.2.03.03. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan yang diberikan kepada perempuan dalam situasi darurat	30 kali	Kota Madiun			
							2.08.03.2.03.04. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tim gugus tugas yang terbentuk	1 tim	Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	2.08.07. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak	100%	2.08.07.2.01. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	100%	2.08.07.2.01.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah	28 sekolah	Kota Madiun			
				2.08.07.2.02. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	2.08.07.2.02.02. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus	40 kali	Kota Madiun			
							2.08.07.2.02.04. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah orang yang mengikuti penguatan jejaring penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	40 orang	Kota Madiun			
				2.08.07.2.03. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	2.08.07.2.03.03. Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga/jejaring penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	12 jejaring/lembaga	Kota Madiun			
	2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Program	Target Capaian		
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	2.09.03. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	95,8	2.09.03.2.01. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama (ton)	16200	2.09.03.2.01.01. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	2				
							2.09.03.2.01.02. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Produksi Pangan Hasil Pekarangan / Kawasan Rumah pangan Lestari (kg)	2000				
							2.09.03.2.01.04. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen	2				
				2.09.03.2.04. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi / AKE (kkal/perkapita)	2100	2.09.03.2.04.01. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen	2				
							2.09.03.2.04.02. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Menu Olahan yang Tercipta (produk)	190				
							2.09.03.2.04.03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen	2				
	2.09.05. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Peningkatan Sampel Pangan yang Teruji (%)	3	2.09.05.2.01. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan	4 kali	2.09.05.2.01.01. Penguatan Kelembagaan Pangan Segar Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Peserta Penguatan Kelembagaan (orang)	450				

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian
							2.09.05.2.01.05. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel yang terperiksa (sampel)	45
	2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
	2.10.10. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	100%	2.10.10.2.01. Penggunaan Tanah yang Hamparananya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi tanah yang digunakan	10 lokasi	2.10.10.2.01.01. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	10 kali
	2.11. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLINGKUNGAN HIDUP								
	2.11.02. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase data Perencanaan LH yang tersedia	69,23%	2.11.02.2.01. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	4 dokumen	2.11.02.2.01.01. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	4 dokumen
				2.11.02.2.02. Penyelegaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab / Kota	Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia	1 dokumen	2.11.02.2.02.03. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	2.11.03. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	48%	2.11.03.2.01. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	68 kegiatan/ usaha	2.11.03.2.01.01. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut	Jumlah koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut	20 kali	Kota Madiun			
							2.11.03.2.01.02. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 dokumen	Kota Madiun			
				2.11.03.2.03. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukna pengolahan limbah cair	15 usaha/ kegiatan	2.11.03.2.03.01. Koordinasi dan Sinkronasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	15 kali	Kota Madiun			
	2.11.04. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	96,83%	2.11.04.2.01. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab / Kota	Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab / Kota	1 lokasi	2.11.04.2.01.01. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	Kota Madiun			
					Jumlah keanekaragaman hayati yang dikelola	59 lokasi	2.11.04.2.01.04. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang dikelola	59 lokasi	Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	2.11.05. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	71%	2.11.05.2.01. Penyimpanan Sementara Limbah B3	jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3	15 lokasi	2.11.05.2.01.01. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan / usaha yang mengurus izin	5 perusahaan				
	2.11.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	52,90%	2.11.06.2.01. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15 perusahaan	2.11.06.2.01.01. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah wajib usaha/kegiatan yang taat dan belum taat pemenuhan pelaporan dokumen perizinan	4 perusahaan				
							2.11.06.2.01.03. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang taat membuat laporan	15 wajib usaha				

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Program	Target Capaian		
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	2.11.08. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	90%	2.11.08.2.01. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	15 kegiatan	2.11.08.2.01.02. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan yang peduli dan berwawasan lingkungan hidup	4 kegiatan				
	2.11.10. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan dan pengaduan lingkungan hidup	90%	2.11.10.2.01. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diselesaikan	10 kasus	2.11.10.2.01.01. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	10 kasus				
							2.11.10.2.01.02. Koordinasi dan Sinkronasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan	jumlah kader sadar hukum lingkungan yang terbentuk	900 usaha				

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Program	Target Capaian		
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	2.12.02. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan dokumen kependudukan	84%	2.12.02.2.01. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan dokumen kependudukan	37.000 dokumen	2.12.02.2.01.04. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah perekaman KTP EL	3.000 data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun			
							2.12.02.2.01.05. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Kependudukan yang diterbitkan	37.000 dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun			
	2.12.03. PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen Akta Pencatatan Sipil	94%	2.12.03.2.01. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil	1.200 dokumen	2.12.03.2.01.02. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akta kelahiran penduduk usia diatas 50 tahun	20.000 dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
							2.12.03.2.01.01. Sub Kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah dokumen akta pencatatan sipil yang diterbitkan	1.200 dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	2.12.04. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akurasi database kependudukan	99,1%	2.12.04.2.01. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase update data penduduk	77%	2.12.04.2.01.03. Sub Kegiatan Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Perkembangan Penduduk	Persentase uptime aplikasi SIAK	99 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
							2.12.04.2.01.05. Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah PKS dan Inovasi	4 buah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				x.xx.xx.x.xx. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penerbitan KTP, KIA dan Akte lahir	27.000 dokumen							
	2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
	2.14.02. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya angka UKP (usia kawin pertama) < 20 tahun	≤ 4 %	2.14.02.2.01. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD yang terlibat dalam program Bangga Kencana (Kampung KB)	>50%	2.14.02.2.01.07. Penyediaan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai iso lokal Kab/Kota	terbentuknya RPP Sekolah siaga Kependudukan di 5 sekolah	100%	Dinkes dan KB			
				2.14.02.2.02. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	tersedianya data PK di 18 kel	100%	2.14.02.2.02.12. pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	terdatanya semua keluarga dalam Pendataan Keluarga (PK) 2021 di 18 kelurahan	100%	Dinkes dan KB			
	2.14.03. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmeet Need	< 8%	2.14.03.2.03. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota	Menurunnya angka Drop Out	<15%	2.14.03.2.03.03. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tercapainya KB MKJP 80 aseptor	100%	Dinas Kesehatan dan KB			
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Jumlah Kampung KB Aktif	7 Kampung KB							

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Program	Target Capaian		
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	2.14.04. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	70%	2.14.04.2.01. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	BKB 67%, BKR 9%, BKL 13% UPPKS 57%	2.14.04.2.01.04. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya pembinaan pada poktan Tribina, PIKR dan UPPKS	Kenaikan pengetahua n peserta sebesar 20%	Dinas Kesehatan dan KB			
							2.14.04.2.01.07. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya sosialisasi kegiatan poktan tribina, PIKR dan UPPKS	Kenaikan pengetahua n peserta sebesar 20%	Dinas Kesehatan dan KB			
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK KB)	Jumlah paket sarana prasarana penyuluhan yang diadakan	2 paket							
	2.15. URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PERHUBUNGAN												
	2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	KEPADATAN LALU LINTAS (Kend/Km)	46	2.15.02.2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase perlengkapan jalan	75%	2.15.02.2.02.01. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah prasarana jalan	1 unit	Wilayah Kota Madiun			
		Persentase Penyelegaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	100%		Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan	200 titik	2.15.02.2.02.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah perlengkapan jalan	937 unit	Wilayah Kota Madiun			
							2.15.02.2.02.04. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik	632 unit	Wilayah Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
								Jumlah perlengkapan jalan yang dilakukan pemeliharaan	6181 titik	Kota Madiun			
				2.15.02.2.06. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah MRLL	160	2.15.02.2.06.01. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah MRLL	2 dokumen	Wilayah Kota Madiun			
							2.15.02.2.06.03. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah kegiatan	1000 orang	Wilayah Kota Madiun			
							2.15.02.2.06.04. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Jumlah kegiatan	5 Kegiatan	Wilayah Kota Madiun			
				2.15.02.2.08. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase kegiatan keselamatan	100%	2.15.02.2.08.02. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor			
							2.15.02.2.08.04. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	Dinas Perhubungan Kota Madiun			
				2.15.02.2.09. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kinerja Angkutan	0,4	2.15.02.2.09.02. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Kendaraan	23000 kend	Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				2.15.02.2.03. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal berfungsi baik	100%	2.15.02.2.03.03. Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Luas bangunan	45 m2	Wilayah Kota Madiun			
				2.15.02.2.05. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan Lulus uji	100%	2.15.02.2.05.04. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji	4600 kend	Wilayah Kota Madiun			
							2.15.02.2.05.07. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat	12 unit	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor			
	2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												
	2.16.02. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	50%	2.16.02.2.01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	2.16.02.2.01.02. Monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa	1200 Informasi	Kota Madiun			
							2.16.02.2.01.04. Pegelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan	5 Media	Kota Madiun			
							2.16.02.2.01.06. Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti	100%	Kota Madiun			
							2.16.02.2.01.10. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif	27 Kelompok	Kota Madiun			
							2.16.02.2.01.12. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	12 Tema Informasi	Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Program	Target Capaian		
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	2.16.03. Program Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE Administrasi Pemerintahan	3,6	2.16.03.2.01. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	100%	2.16.03.2.01.02. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun	126 Domain	Kota Madiun			
							2.16.03.2.01.03. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat	1350 Titik	Kota Madiun			
				2.16.03.2.02. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase OPD yang melaksanakan e-Government	100%	2.16.03.2.02.01. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	1 Paket	Kota Madiun			
							2.16.03.2.02.04. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Client	301 Titik	Kota Madiun			
							2.16.03.2.02.07. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi	7 Aplikasi	Kota Madiun			
							2.16.03.2.02.08. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan	1 Layanan	Kota Madiun			
							2.16.03.2.02.09. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah komunitas penunjang Ekosistem TIK dan Kerja Sama Smart City yang dibina	6 Komunitas	Kota Madiun			
							2.16.03.2.02.11. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Sarana Information Center	1 Unit	Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	x.xx.xx. Program Sosialisasi di Bidang Cukai	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai	100%	x.xx.xx.x.xx. Peningkatan Jumlah Sasaran Penyebaran Informasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat (DBHCHT)	Persentase Sasaran Penyebaran Informasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT) yang tersampaikan kepada Masyarakat	100%	x.xx.xx.x.xx.xx. Penyelenggaraan Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah Event	10 Event	Kota Madiun			
	2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH												
	2.17.05. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	98.69%	2.17.05.2.01. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi aktif	150 koperasi	2.17.05.2.01.01. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah koperasi yang tertib melaksanakan RAT	108 koperasi				
				x.xx.xx.x.xx. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK)	Jumlah anggota koperasi/usaha mikro yang meningkat	151 koperasi/ 25 UM							

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	2.17.06. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif dengan omzet meningkat	52%	2.17.06.2.01. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang dibina	152 koperasi	2.17.06.2.01.01. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	jumlah omset koperasi	80 koperasi				
	2.17.08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro naik kelas	1,86%	2.17.08.2.01. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	jumlah pelaku usaha mikro naik kelas	3 orang	2.17.08.2.01.01. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	145 orang				
	2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
	2.18.03. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang merealisasikan investasi	13%	2.18.03.2.01. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah investor baru	10 investor	2.18.03.2.01.02. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/Kota	jumlah promosi penanaman modal	10 INVESTOR				
	2.18.05. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	jumlah perusahaan wajib LKPM	80 Perusahaan	2.18.05.2.01. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina	100 Perusahaan	2.18.05.2.01.02. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang tertib melaporkan LKPM	15 perusahaan				
	2.18.04. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengaduan pelayanan terselesaikan	80%	2.18.04.2.01. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	jumlah pemohon izin	1500 izin	2.18.04.2.01.01. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berisaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah peserta sosialisasi perizinan elektronik	75 orang				

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				Kabupaten/Kota									
							2.18.04.2.01.02. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	jumlah pemenuhan komitmen berusaha yang dievaluasi	10%				
							2.18.04.2.01.03. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah layanan konsultasi dan Pengaduan yang ditindak lanjuti	50 kali				
	2.18.06. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	persentase jenis izin yang diproses secara elektronik	90%	2.18.06.2.01. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah jenis izin yang di proses menggunakan sistem elektronik	65 Jenis izin	2.18.06.2.01.01. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah jenis izin yang di proses menggunakan sistem elektronik	65 Jenis izin				
	2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
	2.19.02. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Prestasi Pemuda	1	2.19.02.2.01. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda	Jumlah Event Kepemudaan yang diselenggarakan	1 event	2.19.02.2.01.08. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Kabupaten/Kota	Jumlah Keikutsertaan Pemuda	200 orang	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	2.23.02. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai IKM Pemustaka terhadap Layanan Perpustakaan	72%	2.23.02.2.01. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	5%	2.23.02.2.01.01. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengunjung	20.000 orang	Kota Madiun			
							2.23.02.2.01.02. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kota (dana DAK)	Jumlah Paket	2 paket	Kota Madiun			
							2.23.02.2.01.08. Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi	500 eksemplar	Kota Madiun			
							2.23.02.2.01.08. Pengembangan Bahan Pustaka (dana DAK)	Jumlah koleksi	3000 eksemplar	Kota Madiun			
				2.23.02.2.02. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah	Indeks Minat Baca	2	2.23.02.2.02.01. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Perpustakaan Terakreditasi	10 lembaga	Kota Madiun			
							2.23.02.2.02.02. Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket	2 Paket	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
	2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
	2.24.02. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah berkas arsip yang dikelola	59.500 berkas	2.24.02.2.01. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berkas arsip dinamis yang dikelola	59.556 berkas	2.24.02.2.01.02. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah berkas arsip dinamis yang dipelihara dan disusutkan	59.556 berkas	Kota Madiun			
				2.24.02.2.02. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berkas arsip statis yang dikelola	250 berkas	2.24.02.2.02.02. Akuisisi, Pengelolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah berkas arsip statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi dan layanan akses arsip	250 berkas	Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Program	Target Capaian		
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
	3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
	3.25.03. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	0,05	3.25.03.2.02. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	378	3.25.03.2.04. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan (orang)	180				
	3.25.05. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rasio Pendapatan Usaha Perikanan (%)	1	3.25.05.2.02. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Peningkatan Konsumsi Makan Ikan (kg/perkapita/tahun)	15,4	3.25.05.2.01. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan (orang)	488				
	3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
	3.26.02. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	2 destinasi	3.26.02.2.03. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	2 destinasi	3.26.02.2.03.03. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pengembangan destinasi pariwisata	2 event	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga			
							3.26.02.2.03.06. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pemberdayaan masyarakat	1 event	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	3.26.03. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah promosi pariwisata	2 promosi	3.26.03.2.01. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	2 event	3.26.03.2.01.02. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	2 event	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga			
	3.26.05. PROGRAM PENGEMBANGAN SUBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	2 event	3.26.05.2.01. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	2 event	3.26.05.2.01.06. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	2 event	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga			
	3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
	3.27.02. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian (ton/ha)	7,22	3.27.02.2.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase jumlah sarana pertanian yang dimanfaatkan (%)	85	3.27.02.2.01.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana pendukung pertanian (kali)	1				
		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)	0,2				3.27.02.2.01.02. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana pertanian pendukung produktivitas lahan (paket)	1				
				3.27.02.2.03. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Daging Peternakan (ton)	1900	3.27.02.2.03.01. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Penyuluhan (orang)	1185				
	3.27.03. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan pengadaan prasarana (%)	3	3.27.03.2.01. Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya lahan LP2B	120	3.27.03.2.01.01. Pengelolaan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan / LP2B, kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan / KP2B dan lahan cadangan Pertanian	Luas lahan terdata sebagai calon LP2B (Ha)	120				

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							Pangan berkelanjutan / LCP2B						
				x.xx.xx.x.xx. Pembangunan Prasarana Pertanian (DAK)	Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun/dire habilitasi/dipe lihara	100%	x.xx.xx.x.xx.xx. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (DAK)	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun / direhabilitasi / dipelihara	2				
	3.27.05. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan lahan aman bencana pertanian (%)	80	3.27.05.2.01. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian (ha/th)	2000	3.27.05.2.01.01. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Luas lahan yang aman dari gangguan OPT dengan penerapan budidaya ramah lingkungan (ha)	10				
	3.27.07. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Percentase Peningkatan jumlah SDM Pertanian terlatih (%)	5	3.27.07.2.01. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Jenis pelatihan / Penyuluhan Pertanian (jenis)	2	3.27.07.2.01.02. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Petani Yang Mendapatkan Pelatihan/Pembinaan/ Penyuluhan (orang)	117				
	3.27.04. PROGRAM PENGENDALIAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peningkatan Jumlah Hewan dan Produk Asal Hewan yang Terawasi (%)	5	3.27.04.2.01. Penjamin Kesehatan Hewan Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Hewan yang Terlayani (ekor)	3250	3.27.04.2.01.01. Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Hewan yang Terlayani (ekor)	3250				
				3.27.04.2.04. Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Presentase Jumlah sampel Produk asal Hewan yang Aman dikonsumsi (%)	80	3.27.04.2.04.02. Pengawasan peredaran hewan dan produk Hewan	Jumlah sampel produk asal hewan yang diperiksa	200				

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
	3.30.02. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah sarana distribusi perdagangan		3.30.02.2.01. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah surat izin		3.30.02.2.01.01. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah perpanjangan perijinan	75 lembar	Dinas Perdagangan			
	3.30.04. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah ketersediaan bahan pokok dan barang penting		3.30.04.2.02. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan ketersediaan bahan pokok dan barang penting		3.30.04.2.02.01. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan bahan pokok	9 jenis	Dinas Perdagangan			
	3.30.06. PROGRAM STANDARISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah alat yang telah distandarisasi		3.30.06.2.01. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pertumbuhan pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		3.30.06.2.01.01. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang sudah di tera atau tera ulang	7000 uttp	Dinas Perdagangan			
							3.30.06.2.01.02. Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Produk dalam kemasan yang telah diawasi		Dinas Perdagangan			
	3.30.07. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pemasaran produk dalam negeri		3.30.07.2.01. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		3.30.07.2.01.01. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah jenis produk perdagangan yang dipromosikan	15 jenis produk unggulan daerah	Dinas Perdagangan			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							3.30.07.2.01.03. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah dokumen Informasi Perdagangan	1 dokumen	Dinas Perdagangan			
	3.30.03. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah sarana distribusi perdagangan		3.30.03.2.01. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan		3.30.03.2.01.01. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direvitalisasi	3 pasar	Pasar Winongo, Pasar Sepoor dan Pasar Manguharjo			
							3.30.03.2.01.02. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 pasar	Pasar-pasar rakyat dikota Madiun			
				3.30.03.2.02. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		3.30.03.2.02.01. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang dengan pendapatan diatas UMK per bulan	500 orang	Pasar-pasar rakyat dikota Madiun			
							3.30.03.2.02.02. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang ditingkatkan kebersihan dan keamanannya melalui pemberdayaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	17 pasar	Pasar-pasar rakyat dikota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Program	Target Capaian		
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	x.xx.xx. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal	0 buah	x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak di lekati Pita Cukai (DBHCHT)	Jumlah informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu	0 buah							
	3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
	3.31.02. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	100%	3.31.02.2.01. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	2 dokumen	3.31.02.2.01.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahkan Industri	Jumlah dokumen Induk perindustrian	2 dokumen	Dinas Tenaga Kerja			
							3.31.02.2.01.03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi Standarisasi HKI	20 IKM	Dinas Tenaga Kerja			
							3.31.02.2.01.05. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan Usaha Mikro	130 IKM (tiga kali kegiatan)	Dinas Tenaga Kerja			
	3.31.04. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang mengikuti pemasaran produk	12,80%	3.31.04.2.01. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran produk Dalam Negeri	5 kali pameran	3.31.04.2.01.02. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pameran/pemasaran Produk	5 kali pameran				

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Program	Target Capaian		
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	x.xx.xx. PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI	Persentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)	4 pengujian	x.xx.xx.x.xx. Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian TAR dan Nikotin bagi Industri Kecil dan Menengah, serta pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practices bagi Industri Hasil Tembakau (DBH-CHT)	jumlah pengujian kadar Tar dan Nikotin	4 kali							
	3.32. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI												
	3.32.03. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pendaftar Transmigrasi yang terfasilitasi	3%	3.32.03.2.01. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sosialisasi ketransmigrasi an	1 kegiatan	3.32.03.2.01.05. Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah sosialisasi ketransmigrasian	1 kegiatan	Dinas Tenaga Kerja			
	4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
	4.01. SEKRETARIAT DAERAH												
	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indek Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	80,08	4.01.02.2.01. Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan administrasi pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	4.01.02.2.01.01. Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan	8 kali	Kota Madiun			
							4.01.02.2.01.02. Pengelolaan Administrasi Kewilayahannya	Jumlah dokumen Rupa Bumi	1 dokumen	Kec. Manguharjo	Kota Madiun		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							4.01.02.2.01.03. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 dokumen	Kota Madiun			
				4.01.02.2.04. Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama yang difasilitasi	100%	4.01.02.2.04.01. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Fasilitasi kerjasama yang dilaksanakan	5 kali	Kota Madiun			
				4.01.02.2.02. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	4.01.02.2.02.01. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah fasilitasi bina mental spiritual	15 kegiatan	dalam dan luar kota			
				4.01.02.2.03. koordinasi penyusunan kebijakan daerah	Persentase Produk Hukum yang berkualitas	100%	4.01.02.2.03.01. fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Jumlah Sosialisasi Perda dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	2 jenis	Kota Madiun			
							4.01.02.2.03.02. fasilitasi bantuan hukum	Jumlah Pembinaan dan Bantuan Hukum	3 kegiatan	Kota Madiun			
							4.01.02.2.03.03. pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah publikasi produk hukum daerah	3 jenis	Kota Madiun			
	4.01.03. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	80,98	4.01.03.2.01. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan sesuai Target	100%	4.01.03.2.01.01. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 kegiatan	dalam kota			
							4.01.03.2.01.02. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 kegiatan	dalam dan luar kota			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				4.01.03.2.02. kegiatan administrasi pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Realisasi Fisik Keuangannya > 79% dari target	100%	4.01.03.2.02.01. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah pedoman pelaksanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2 Dokumen	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan			
							4.01.03.2.02.03. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan kegiatan pembangunan yang terealisasi sesuai target	12 Dokumen	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan			
				4.01.03.2.03. kegiatan pengadaan barang dan jasa	Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang & Jasa > 79% dari target	100%	4.01.03.2.03.01. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah personil perangkat daerah yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan	130 Orang	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan			
							4.01.03.2.03.02. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai target	120 Paket	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	x.xx.xx. PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Yang Dilaksanakan	100%	x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ atau Pemangku Kepentingan melalui Forum Tatap Muka, Media Elektronik dan Media Cetak	Jumlah informasi yang disampaikan	3 Macam penyampaian informasi							
				x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	Jumlah Pemantau dan evaluasi	12 kali							
	x.xx.xx. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL DI BIDANG EKONOMI	Persentase Kelompok Sosial Ekonomi Yang Difasilitasi	100%	x.xx.xx.x.xx. Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jenis kegiatan Promosi	2 Jenis kegiatan promosi							
	4.01.04. PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	IKM di bidang administrasi umum	84,74%	4.01.04.2.01. Pelaksanaan Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	4.01.04.2.01.01. Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Jumlah fasilitasi Tata Usaha	3 jenis	Sekretariat Daerah Bagian Umum			
				4.01.04.2.03. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya fasilitasi keprotokolan pimpinan Pemerintah Daerah	100%	4.01.04.2.03.01. Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah fasilitasi keprotokolan pimpinan Pemerintah Daerah	500 kali	dalam dan luar kota			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				4.01.04.2.02. Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Organisasi	Sedang (skor 28,1-37)	4.01.04.2.02.01. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Besaran dan Urusan Kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	Sekretariat Daerah			
							4.01.04.2.02.03. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya bernilai BB	100%	Sekretariat Daerah			
							4.01.04.2.02.02. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	2,7	Sekretariat Daerah			
	4.02. SEKRETARIAT DPRD												
	4.02.02. PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak-hak Dewan		4.02.02.2.01. Layanan Administrasi DPRD			4.02.02.2.01.02. Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah dokumen notulensi hasil rapat Alat Kelengkapan dewan yang disusun	45 Dokumen	Kota Madiun			
							4.02.02.2.01.03. Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD	jumlah kebutuhan fraksi yang dipenuhi	3 jenis	Kota Madiun			
				4.02.02.2.02. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	persentase pelayanan terhadap hak keuangan DPRD	100%	4.02.02.2.02.01. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	terpenuhinya hak keuangan DPRD	12 bulan	Kota Madiun			
							4.02.02.2.02.02. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	jumlah pakaian dinas dan atribut yang dicukupi	5 jenis	Kota Madiun			
							4.02.02.2.02.03. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	layanan kesehatan DPRD	1 kali	Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	4.02.03. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD Terhadap Layanan Perundang-Undangan		4.02.03.2.01. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	persentase tercapainya fungsi pembentukan perda DPRD	100%	4.02.03.2.01.02. Pembahasan Rancangan Perda	jumlah raperda yang akan dibahas	10 raperda	Kota Madiun			
				4.02.03.2.02. Pembahasan Kebijakan Anggaran	persentase anggota dewan yang setuju dengan hasil pembahasan	100%	4.02.03.2.02.03. Pembahasan APBD	Pembahasan yang sesuai jadwal/tepat waktu	4 dokumen	Kota Madiun			
				4.02.03.2.03. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	persentase fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan	100%	4.02.03.2.03.06. Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	jumlah dokumen notulensi hasil rapat pembahasan tindak lanjut atas LHP BPK	5 dokumen	Kota Madiun			
							4.02.03.2.03.07. Pengawasan penggunaan anggaran	Pembahasan LKPJ dan LPJ yang Tepat Waktu	2 dokumen	Kota Madiun			
				4.02.03.2.04. Peningatan Kapasitas DPRD	persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	100%	4.02.03.2.04.02. Bimbingan Teknis DPRD	anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis	150 orang	Luar Daerah			
							4.02.03.2.04.03. Publikasi dan Dokumentasi Dewan	jumlah Kegiatan DPRD yang dipublikasikan	50 acara	Kota Madiun			
							4.02.03.2.04.07. Penyusunan Program Kerja DPRD	tersusunnya Program kerja DPRD tepat waktu	1 dokumen	Kota Madiun			
				4.02.03.2.05. Penyerapan dan Penghimpuna Aspirasi Masyarakat	jumlah dokumen Serap aspirasi	3 dokumen	4.02.03.2.05.03. Pelaksanaan Reses	jumlah pelaksanaan kegiatan reses	3 Kali	Kota Madiun			
				4.02.03.2.08. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100%	4.02.03.2.08.01. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	180 kali	Luar Daerah			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							4.02.03.2.08.03. Pelaksanaan Undangan DPRD	jumlah undangan yang dihadiri	50 kali				
	5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
	5.01. PERENCANAAN												
	5.01.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaannya sesuai ketentuan	100%	5.01.02.2.01. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	tersusunnya dokumen sinergitas hasil verifikasi dokument-dokumen perencanaan	1 dok	5.01.02.2.01.01. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	terpenuhinya kebutuhan koordinasi tingkat Kota	100%	Kota Madiun			
							5.01.02.2.01.03. Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	terlaksananya pelaksanaan musrenbang kota	1 kali	Kota Madiun			
							5.01.02.2.01.04. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	terlaksananya pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 kali	Kota Madiun			
							5.01.02.2.01.07. Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	terpenuhinya kebutuhan data dan informasi	100%	Kota Madiun			
							5.01.02.2.01.08. Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah	terpenuhinya kebutuhan keamanan data dan informasi	100%	Kota Madiun			
				5.01.02.2.02. Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 dok	5.01.02.2.02.01. Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah	terpenuhinya kebutuhan koordinasi penyusunan pagu indikatif tingkat Kota	100%	Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				5.01.02.2.03. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	tersusunnya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	5.01.02.2.03.02. Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	tersusunnya dokumen monitoring program/keg SPM	2 dok semester	Kota Madiun			
							5.01.02.2.03.03. Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen evaluasi program/keg tingkat kota	4 dokumen triwulan 2 dokumen semester	Kota Madiun			
	5.01.03. PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase Capaian Target Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	5.01.03.2.01. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	tersusunnya dokumen Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	1 dokumen	5.01.03.2.01.01. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	terpenuhinya kebutuhan koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	100%	Kota Madiun			
							5.01.03.2.01.03. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan tingkat Kota	12 dokumen hasil monitoring dan 2 dok evaluasi	Kota Madiun			
				5.01.03.2.02. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	tersusunnya dokumen Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen	5.01.03.2.02.01. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	terpenuhinya kebutuhan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	100% (seminar)	Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							5.01.03.2.02.03. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia tingkat Kota	12 dokumen hasil monitoring dan 2 dok evaluasi	Kota Madiun			
	5.01.04. PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Capaian Target Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	5.01.04.2.01. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Tersusunnya dokumen Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	1 dokumen	5.01.04.2.01.01. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	terpenuhinya kebutuhan koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	100%	Kota Madiun			
							5.01.04.2.01.03. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang Kesejahteraan Masyarakat tingkat Kota	12 dokumen hasil monitoring dan 2 dok evaluasi	Kota Madiun			
	5.01.05. PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase Capaian Target Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	100%	5.01.05.2.01. Fasilitasi dan Monev Penyusnan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen Fasilitasi dan Monev Penyusnan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	5.01.05.2.01.03. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	tersusunnya dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Bidang Sumber Daya Alam	2 dokumen hasil monitoring dan 1 dok evaluasi	Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				5.01.05.2.02. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Tersusunnya dokumen Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	1 dokumen	5.01.05.2.02.01. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	terpenuhinya kebutuhan koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	100%	Kota Madiun			
							5.01.05.2.02.03. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	tersusunnya dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan okumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	2 dokumen hasil monitoring dan 1 dok evaluasi	Kota Madiun			
				5.01.05.2.03. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bdang Keciptakaryaan dan Kewilayahana	Tersusunnya dokumen Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bdang Keciptakaryaan dan Kewilayahana	1 dokumen	5.01.05.2.03.03. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahana.	tersusunnya dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan okumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahana.	2 dokumen hasil monitoring dan 1 dok evaluasi	Kota Madiun			
	5.02. KEUANGAN												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	5.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	realiasasi kinerja yang memenuhi target	100%	5.02.02.2.01. koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	tepat waktu	5.02.02.2.01.01. Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen yang disusun	2 dokumen	BPKAD			
							5.02.02.2.01.02. Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen yang disusun	2 dokumen	BPKAD			
							5.02.02.2.01.03. Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Jumlah RKA yang terfasilitasi	5 fitur	BPKAD			
							5.02.02.2.01.04. Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Jumlah DPA yang terfasilitasi	2 dokumen	BPKAD			
							5.02.02.2.01.05. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen yang disusun	2 dokumen	BPKAD			
							5.02.02.2.01.07. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	2 dokumen	BPKAD			
				5.02.02.2.02. koordinasi dan pengelolaan perpendaharaan daerah	Pengelolaan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan	100%	5.02.02.2.02.01. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kasda	55 dokumen	BPKAD			
							5.02.02.2.02.04. Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Jumlah Dokumen Pengeluaran Kas	3 jenis dokumen	BPKAD			
				5.02.02.2.03. koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	permintaan laporan keuangan yang terfasilitasi	Tepat waktu	5.02.02.2.03.02. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Produk Hukum	2 Produk Hukum	BPKAD			
							5.02.02.2.03.08. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis	2 Buku	BPKAD			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							Pelaksanaan APBD						
							5.02.02.2.03.09. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	jumlah dokumen	3 Dokumen	BPKAD			
							5.02.02.2.03.12. Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Sosialisasi dan pendampingan OPD	500 orang/ 30 pendampingan	BPKAD			
	5.02.03. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi Pengelolaan Aset Terhadap PAD	100%	5.02.03.2.01. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	5.02.03.2.01.05. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah	5 dokumen	BPKAD			
							5.02.03.2.01.07. Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Daerah yang diasuransikan	2 jenis aset (gedung dan Kendaraan Dinas) / 6 tanah/bangunan	BPKAD			
							5.02.03.2.01.11. Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	jenis dan tipe barang yang sudah terstandart	18 buku	dalam dan luar kota			
	5.02.04. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	1,5%	5.02.04.2.02. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1,5%	5.02.04.2.02.02. Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Kebijakan Intensifikasi	1 Dokumen	Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							5.02.04.2.02.04. Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kota Madiun			
							5.02.04.2.02.06. Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Inovasi Berbasis IT	1 Aplikasi	Kota Madiun			
							5.02.04.2.02.07. Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Jumlah Konsultasi	2.500 WP	Kota Madiun			
							5.02.04.2.02.09. Pemeliharaan dan Pemutakiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kota Madiun			
							5.02.04.2.02.10. Pemeriksaan Pajak Daerah	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah dan Petugas Pungut PBB	20 WP	Kota Madiun			
							5.02.04.2.02.11. Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kota Madiun			
	5.03. KEPEGAWAIAN												
	5.03.02. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	IKM Perangkat Daerah	75	5.03.02.2.01. Pengelolaan Data dan Infromasi ASN	Persentase updating data dan informasi kepegawaian sesuai SOP	100%	5.03.02.2.01.04. Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Dipudate	3451 dokumen	BKD Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				5.03.02.2.02. Administrasi Kepegawaian	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP	100%	5.03.02.2.02.01. Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah formasi	300 Formasi	BKD Kota Madiun			
							5.03.02.2.02.02. Penataan dan Mutasi Jabatan	Jumlah penempatan PNS	209 PNS	BKD Kota Madiun			
							5.03.02.2.02.04. Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	225 PNS	BKD Kota Madiun			
							5.03.02.2.02.10. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan	2142 Dokumen	BKD Kota Madiun			
				5.03.02.2.03. Peningkatan Kapasitas ASN	Persentase ASN yang meningkat Kapasitasnya	100%	5.03.02.2.03.01. Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah peserta	60 Peserta	BKD Kota Madiun			
							5.03.02.2.03.03. Pengembangan Assessment Center	Jumlah peserta	60 PNS	BKD Kota Madiun			
				5.03.02.2.05. Pembinaan ASN	Persentase Terselesaikannya permasalahan Kepegawaian	100%	5.03.02.2.05.03. Penegakan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah Dokumen	3991 dokumen	BKD Kota Madiun			
	5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
	5.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kapasitas sesuai dengan keahlian dan kompetensi	100%	5.04.02.2.01. Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Teknis Aparatur	100%	5.04.02.2.01.03. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Pejabat Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta	100 Peserta	BKD Kota Madiun			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
				5.04.02.2.02. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Managerial dan Fungsional Aparatur	90%	5.04.02.2.02.07. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta	380 PNS	BKD Kota Madiun			
	5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
	5.05.02. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian/ Kajian yang dapat dimanfaatkan	100%	5.05.02.2.01. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersusunnya dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 dok	5.05.02.2.01.02. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.	Tersusunnya dokumen Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.	1 dok	Kota Madiun			
							5.05.02.2.01.12. Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Terbangunnya aplikasi Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	1 aplikasi	Kota Madiun			
		Persentase Inovasi terfasilitasi	45%	5.05.02.2.04. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersusunnya Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 dok	5.05.02.2.04.01. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	tersusunnya dokumen pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dok (seminar)	Kota Madiun			
					Jumlah Inovasi yang terfasilitasi	20 inovasi	5.05.02.2.04.05. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Fasilitasi Cipta Teknologi Tepat guna	2 kegiatan	Kota Madiun			
	6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Program	Target Capaian		
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	6.01. INSPEKTORAT DAERAH												
	6.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	25%	6.01.02.2.01. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	25%	6.01.02.2.01.01. Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen hasil audit	18 dokumen	Inspektorat Kota Madiun			
							6.01.02.2.01.02. Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen hasil reviu	8 dokumen	Inspektorat Kota Madiun			
							6.01.02.2.01.03. Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen laporan kegiatan	9 dokumen	Inspektorat Kota Madiun			
							6.01.02.2.01.04. Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen hasil evaluasi	4 dokumen	Inspektorat Kota Madiun			
	6.01.03. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	100%	6.01.03.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	100%	6.01.03.2.01.01. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	2 dokumen	Inspektorat Kota Madiun			
	7. UNSUR KEWILAYAHAN												
	7.01. KECAMATAN												
	7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pendeklegasian wewenang sesuai ketentuan	100%	7.01.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya ya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	7.01.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100%	Kecamatan Kartoharjo			
							7.01.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100%	Kecamatan Manguharjo			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							7.01.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100%	Kecamatan Taman			
				7.01.02.2.03. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100%	7.01.02.2.03.01. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100%	Kecamatan Kartoharjo			
							7.01.02.2.03.01. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100%	Kecamatan Manguharjo			
							7.01.02.2.03.01. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100%	Kecamatan Taman			
	7.01.03. PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan musrenbang kartoharjo yang diprioritaskan dalam RKPD		7.01.03.2.02. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat		7.01.03.2.02.01. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Persentase usulan musrenbang kartoharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	10%	Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Kartoharjo			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							7.01.03.2.02.01. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Persentase usulan musrenbang Manguharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	10%	Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Manguharjo			
							7.01.03.2.02.01. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Persentase usulan musrenbang Taman yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	10%	Kecamatan Taman			
							7.01.03.2.02.02. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	27 paket	Kelurahan di kecamatan kartoharjo			
							7.01.03.2.02.02. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	27 paket	Kelurahan di kecamatan Manguharjo			
							7.01.03.2.02.02. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	27 paket	Kecamatan Taman			
							7.01.03.2.02.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	Kelurahan di kecamatan kartoharjo			
							7.01.03.2.02.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	Kelurahan di kecamatan Manguharjo			
							7.01.03.2.02.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	Kecamatan Taman			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	7.01.04.2.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%	7.01.04.2.01.02. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	Kecamatan Kartoharjo			
							7.01.04.2.01.02. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	Kecamatan Manguharjo			
							7.01.04.2.01.02. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	Kecamatan Taman			
				7.01.04.2.02. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	7.01.04.2.02.01. Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	Kecamatan Kartoharjo			
							7.01.04.2.02.01. Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	Kecamatan Manguharjo			
							7.01.04.2.02.01. Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	Kecamatan Taman			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							Indonesia						
	7.01.05. PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan sesuai ketentuan perundang - undangan	100%	7.01.05.2.01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	100%	7.01.05.2.01.01. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Sosialisasi	100%	Kecamatan Kartoharjo			
							7.01.05.2.01.01. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Sosialisasi	100%	Kecamatan Manguharjo			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							7.01.05.2.01.01. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Sosialisasi	100%	Kecamatan Taman			
							7.01.05.2.01.05. Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase konflik yang terselesaikan	100%	Kecamatan Kartoharjo			
							7.01.05.2.01.05. Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase konflik yang terselesaikan	100%	Kecamatan Manguharjo			
							7.01.05.2.01.05. Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase konflik yang terselesaikan	100%	Kecamatan Taman			
							7.01.05.2.01.07. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	2 dokumen	Kecamatan Kartoharjo			
							7.01.05.2.01.07. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	2 dokumen	Kecamatan Manguharjo			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
							7.01.05.2.01.07. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	2 dokumen	Kecamatan Taman			
	8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
	8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
	8.01.02. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang memahami nilai-nilai Nasionalisme	100%	8.01.02.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			8.01.02.2.01.03. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	* Sosialisasi Penguanan Ideologi Pancasila * Lomba pidato Bung Karno * Revitalisasi Pancasila (Rumah Bersama)	810 orang	Bakesbangpol			
	8.01.06. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Konflik horisontal di dalam masyarakat	0 konflik	8.01.06.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik	0 konflik	8.01.06.2.01.04. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	* Rakor Forkopimda * Rakor Intel * Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik	780 orang	Bakesbangpol			

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Program	Target Capaian		
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	8.01.03. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemahaman masyarakat dibidang politik	80%	8.01.03.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pematauan Situasi Politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik	80%	8.01.03.2.01.04. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pematauan Situasi Politik di daerah	Jumlah peserta pengelolaan keuangan Parpol	22 orang	Bakesbangpol			
							8.01.03.2.01.03. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pematauan Situasi Politik	Jumlah peserta pembinaan	100 orang	Bakesbangpol			
	8.01.04. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Orkemas Berbadan Hukum	45	8.01.04.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orkemas yang aktif	100 orkemas	8.01.04.2.01.03. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta fasilitasi	100 orang	Bakesbangpol			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian		Hasil Program	Target Capaian				
	8.01.05. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	8.01.05.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah koordinasi	3 kali	8.01.05.2.01.03. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	Bakesbangpol			
							8.01.05.2.01.04. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan	200 orang	Bakesbangpol			

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi

Berdasarkan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, maka plafon anggaran sementara Kota Madiun Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.1
Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN					PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.	
1					2	3	4
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	406.182.728.055	
1	01				PENDIDIKAN	120.998.161.725	
					Dinas Pendidikan	120.998.161.725	Perangkat Daerah Lama
1-1	0-0	0-0	01		Dinas Pendidikan		Perangkat Daerah Baru
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	117.651.112.125	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	75.806.302.600	
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	13.688.000.000	
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	36.621.250.000	
1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.310.218.670	
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	626.927.582	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	854.015.845	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	670.290.503	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo	288.800.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo	52.800.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kartoharjo	66.400.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Klejen	296.000.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Klejen	121.600.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Klejen	287.200.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Klejen	85.600.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo	228.000.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Rejomulyo	84.800.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Rejomulyo	51.200.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2	3	4
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kanigoro	92.800.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kanigoro	136.000.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kanigoro	143.200.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sukosari	33.600.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN Pilangbango	184.000.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Tawangrejo	133.600.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Tawangrejo	86.400.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kelun	141.600.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manguharjo	272.000.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Lor	248.000.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Lor	114.400.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Madiun Lor	105.600.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor	122.400.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor	419.200.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor	293.600.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor	362.400.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul	124.800.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul	164.200.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul	247.200.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul	122.400.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Winongo	277.600.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Winongo	54.400.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN Ngegong	197.800.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN Patihan	288.800.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pangongan	77.600.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pangongan	256.800.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sogaten	145.600.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Taman	364.800.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Taman	64.000.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Taman	82.400.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pandean	288.000.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pandean	264.000.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN Banjarejo	374.400.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Mojorejo	109.600.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Mojorejo	436.000.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manisrejo	283.200.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Manisrejo	251.200.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Manisrejo	145.600.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Manisrejo	194.400.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Demangan	130.400.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Demangan	138.400.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Josenan	149.600.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Josenan	145.600.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Josenan	86.400.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kejuron	50.400.000	
1	01	02	2.01	xx	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kuncen	68.800.000	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30.098.362.037	
x	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	5.912.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2	3	4
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.384.371.000	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	9.303.379.941	
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	568.940.400	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.013.884.469	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	551.786.227	
1	01	02	2.02	xx	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 1	1.303.000.000	
1	01	02	2.02	xx	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 2	744.000.000	
1	01	02	2.02	xx	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 3	573.000.000	
1	01	02	2.02	xx	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 4	886.000.000	
1	01	02	2.02	xx	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5	462.000.000	
1	01	02	2.02	xx	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6	650.000.000	
1	01	02	2.02	xx	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7	764.000.000	
1	01	02	2.02	xx	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8	550.000.000	
1	01	02	2.02	xx	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9	439.000.000	
1	01	02	2.02	xx	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10	518.000.000	
1	01	02	2.02	xx	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11	651.000.000	
1	01	02	2.02	xx	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12	723.000.000	
1	01	02	2.02	xx	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13	725.000.000	
1	01	02	2.02	xx	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14	376.000.000	
1	01	02	2,03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.227.104.128	
1	01	02	2,03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	316.089.480	
1	01	02	2,03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	3.195.000.000	
1	01	02	2,03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	5.716.014.648	
1	01	02	2,04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.519.343.360	
1	01	02	2,04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	918.689.600	
1	01	02	2,04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	525.000.000	
1	01	02	2,04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.075.653.760	
1	1	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	572.110.560	
1	1	03	2,01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	572.110.560	
1	1	03	2,01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	572.110.560	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.774.939.040	
1	01	04	2,01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.774.939.040	
1	01	04	2,01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.540.875.720	
1	01	04	2,01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.234.063.320	
1	02				KESEHATAN	143.437.048.930	
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	58.084.464.380	Perangkat Daerah Lama
1-2	2-14	0-0	03		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Perangkat Daerah Baru

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1				2		3	4
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	2,01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			
1	02	02	2,01	16		Pengadaan Obat, Vaksin	166.765.000
1	02	02	2,02	17		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.406.380.380
1	02	02	2,02	01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	254.649.990
1	02	02	2,02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3.600.000
1	02	02	2,02	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	58.235.000
1	02	02	2,02	08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4.000.000
1	02	02	2,02	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.320.000
1	02	02	2,02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	152.359.000
1	02	02	2,02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	111.124.150
1	02	02	2,02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	65.716.000
1	02	02	2,02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	130.380.800
1	02	02	2,02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	125.952.000
1	02	02	2,02	22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	138.935.000
1	02	02	2,02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.230.000
1	02	02	2,02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (APBD dan DBHCHT)	23.627.334.000
1	02	02	2,02	28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	9.910.000
1	02	02	2,02	29		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	72.012.600
1	02	02	2,02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas (BLUD)	9.879.555.200
1	02	02	2,02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas (UKK)	5.499.290.400
1	02	02	2,02	34		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.744.928.240
1	02	02	2,02	xx		Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (Bk Prov)	55.000.000
1	02	02	2,02	xx		Kegiatan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (Bk Prov)	30.000.000
1	02	02	2,02	xx		Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK)	749.593.000
1	02	02	2,02	xx		Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK)	39.448.000
1	02	02	2,02	xx		Kegiatan Pengawasan Obat dan Makan (DAK)	247.615.000
1	02	02	2,02	xx		Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan (DAK)	3.171.009.000
1	02	02	2,02	xx		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Manguharjo (DAK)	463.002.000
1	02	02	2,02	xx		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Patihan (DAK)	459.810.000
1	02	02	2,02	xx		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Demangan (DAK)	535.000.000
1	02	02	2,02	xx		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Banjarejo (DAK)	580.632.000
1	02	02	2,02	xx		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Oro-oru Ombo (DAK)	496.964.000
1	02	02	2,02	xx		Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tawangrejo (DAK)	564.295.000
1	02	02	2,02	xx		Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	29.480.000
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		209.036.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2	3	4
1	02	03	2,04		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	209.036.000	
1	02	03	2,04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	209.036.000	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	6.025.000	
1	02	04	2,03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	6.025.000	
1	02	04	2,03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	6.025.000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	797.168.000	
1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	83.275.000	
1	02	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	83.275.000	
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	713.893.000	
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	713.893.000	
x	xx	xx			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	7.499.090.000	
x	xx	xx	xxx	02	Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT)	5.696.091.000	
x	xx	xx	xxx	03	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Manguharjo (DBHCHT)	266.050.000	
x	xx	xx	xxx	04	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Patihan (DBHCHT)	212.330.000	
x	xx	xx	xxx	05	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Demangan (DBHCHT)	326.000.000	
x	xx	xx	xxx	06	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Banjarejo (DBHCHT)	346.215.000	
x	xx	xx	xxx	07	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Oro-Oro Ombo (DBHCHT)	281.900.000	
x	xx	xx	xxx	08	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/ Promotif maupun Kuratif/ Rehabilitatif di Puskesmas Tawangrejo (DBHCHT)	249.475.000	
x	xx	xx	xxx	09	Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (Bk Prov)	121.029.000	
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	85.352.584.550	Perangkat Daerah Lama
1-2	2-14	0-0	03	01	RSUD		Perangkat Daerah Baru
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	78.968.581.550	
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	3.315.840.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2	3	4
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK)	3.315.840.000	
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.652.741.550	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	75.652.741.550	
x	xx	xx			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	6.384.003.000	
x	xx	xx	xxx	01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.384.003.000	
1	03				PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	116.020.400.000	
					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	116.020.400.000	Perangkat Daerah Lama
1-3	0-0	0-0	01		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Perangkat Daerah Baru
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	21.300.000.000	
1	03	08	2.01	01	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik fungsi Bangunan Gedung	21.300.000.000	
1	03	8	2,01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan BangunanGedung, serta Implementasi SIMBG	200.000.000	
1	03	8	2,01	02	Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan rehabilitasi, renovasi, Ubahsuai, serta pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota	21.100.000.000	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	500.000.000	
1	03	11	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	500.000.000	
1	03	11	2,01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	250.000.000	
1	03	11	2,01	07	Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	250.000.000	
1	3	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	16.881.400.000	
1	03	09	2.01		Kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kab/kota	16.881.400.000	
1	03	09	2.01	03	Penataan bangunan dan lingkungan	16.881.400.000	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	38.289.000.000	
1	03	10	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kab/ Kota	38.289.000.000	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis sistem pengembangan jalan	2.017.000.000	
1	03	10	2.01	02	Pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan jalan	700.000.000	
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	412.000.000	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan jalan	2.450.000.000	
1	03	10	2.01	06	Pelebaran jalan Menuju Standar	1.320.000.000	
1	03	10	2.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	1.075.000.000	
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	12.580.000.000	
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan berkala jalan	14.540.000.000	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan rutin jalan	2.335.000.000	
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	655.000.000	
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan rutin jembatan	205.000.000	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE KAB/KOTA	15.500.000.000	
1	03	06	2.01		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung langsung dengan sungai dalam daerah	15.500.000.000	
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis sistem drainase perkotaan	1.000.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2	3	4
1	03	06	2.01	05	Pembangunan saluran sistem drainase perkotaan dan lingkungan	12.000.000.000	
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase	2.500.000.000	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	22.050.000.000	
1	03	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai atau WS dalam satu daerah kab/kota	22.050.000.000	
1	03	02	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	650.000.000	
2	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	21.400.000.000	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.500.000.000	
1	03	12	2.01		Penetapan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) Kota/ Kab	800.000.000	
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan, persetujuan, substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kab/ Kota	800.000.000	
1	03	12	2,04		Koordinasi dan singkronisasi pengendalian pemanfaatan Ruang daerah Kab/ Kota	400.000.000	
1	03	12	2,04	02	Koordinasi dan singkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan Ruang	400.000.000	
1	03	12	2,03		Koordinasi dan singkronisasi pemanfaatan Ruang daerah Kab/ Kota	300.000.000	
1	03	12	2,03	01	Koordinasi dan singkronisasi pemanfaatan Ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	300.000.000	
1	04				PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.822.500.000	
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.822.500.000	Perangkat Daerah Lama
1-4	2-10	0-0	02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Perangkat Daerah Baru
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.187.450.000	
1	04	02	2,01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	76.500.000	
1	04	02	2,01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	76.500.000	
1	04	02	2,05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.110.950.000	
1	04	02	2,05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.110.950.000	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	4.160.400.000	
1	04	03	2,02		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	504.050.000	
1	04	03	2,02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	100.200.000	
1	04	03	2,02	02	Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	403.850.000	
1	04	03	2,03		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.656.350.000	
1	04	03	2,03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	2.200.350.000	
1	04	03	2,03	03	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1.456.000.000	
1	04	04			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.474.650.000	
1	04	04	2,01		Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.474.650.000	
1	04	04	2,01	02	Penyediaan Prasarana,sarana dan utilitas umum diperumahan untuk menunjang fungsi hunian	2.374.450.000	
1	04	04	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	100.200.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.	
1				2		3	4	
1	05			KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4.333.677.000		
				Satuan Polisi Pamong Praja		3.139.208.000	Perangkat Daerah Lama	
1-5	0-0	0-0	03	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran			Perangkat Daerah Baru	
1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		2.072.977.000		
1	05	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.732.977.000		
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		250.000.000	
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada		986.030.000	
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		58.500.000	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		181.730.000	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia		256.717.000	
1	05	02	2.02		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		340.000.000	
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		210.000.000	
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota		130.000.000	
1	05	04		PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN		1.066.231.000		
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.022.948.000	
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		776.358.000	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		246.590.000	
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		43.283.000	
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		43.283.000	
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.194.469.000	Perangkat Daerah Lama
1-5	0-0	0-0	04		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Perangkat Daerah Baru
1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		1.194.469.000		
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana		103.880.000	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana		103.880.000	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1.090.589.000	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana		92.253.000	
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		86.300.000	
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan		78.686.000	
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana		86.350.000	
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana		747.000.000	
1	06				SOSIAL		13.570.940.400	
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		13.570.940.400	
							Perangkat Daerah Lama	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2	3	4
1-6	2-8	0-0	02		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Perangkat Daerah Baru
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.537.044.700	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.537.044.700	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	190.075.000	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	28.920.000	
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	43.980.000	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.274.069.700	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	8.972.715.400	
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	7.880.000	
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	3.600.000	
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	4.080.000	
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	200.000	
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	8.964.835.400	
1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	864.925.000	
1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	8.099.910.400	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	502.390.000	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	183.250.000	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	40.150.000	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	10.000.000	
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	133.100.000	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	319.140.000	
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	13.370.000	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	305.770.000	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.493.190.300	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	1.250.888.040	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	245.538.040	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	15.000.000	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	7.000.000	
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	18.200.000	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	68.900.000	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis, dan Masyarakat	818.400.000	
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	77.850.000	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	242.302.260	
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	138.302.260	
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	42.400.000	
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	7.000.000	
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	36.400.000	
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	18.200.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN							PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2		3	4
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		65.600.000	
1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		65.600.000	
1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		65.600.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		76.131.093.710	
2	07				TENAGA KERJA		3.373.847.340	
					Dinas Tenaga Kerja		3.373.847.340	Perangkat Daerah Lama
2-17	3-31	2-7	10		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Tenaga Kerja			Perangkat Daerah Baru
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		218.618.040	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		218.618.040	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		170.622.440	
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		47.995.600	
x	xx	xx			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan		972.571.500	
x	xx	xx	xxx		Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBH - CHT)		972.571.500	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		407.889.360	
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		407.889.360	
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		131.146.320	
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		156.469.200	
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja		120.273.840	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		1.774.768.440	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.667.000.000	
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		200.000.000	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		1.467.000.000	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		107.768.440	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		107.768.440	
2	08				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		2.368.948.180	
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2.368.948.180	Perangkat Daerah Lama
1-6	2-8	0-0	02		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Perangkat Daerah Baru
2	08	02			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		1.430.375.920	
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		169.722.640	
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		98.922.640	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2	3	4
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	43.750.000	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	12.550.000	
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	14.500.000	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.001.030.640	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	121.272.640	
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	879.758.000	
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	259.622.640	
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.622.640	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	56.650.000	
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	52.350.000	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	473.304.040	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.383.000	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45.383.000	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	427.921.040	
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	90.756.640	
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160.150.000	
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.365.000	
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.649.400	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	293.522.360	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	94.114.820	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	58.630.320	
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.484.500	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	156.472.020	
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan, Kabupaten/Kota	156.472.020	
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.935.520	
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	26.276.520	
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	16.659.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2	3	4
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	171.745.860	
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	71.029.560	
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	71.029.560	
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66.920.500	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	1.500.000	
2	08	07	2.02	04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	65.420.500	
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.795.800	
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	33.795.800	
2	09				PANGAN	1.014.763.000	
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.014.763.000	Perangkat Daerah Lama
2-9	3-27	0-0	02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Perangkat Daerah Baru
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	762.146.000	
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	317.115.000	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	55.050.000	
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	180.065.000	
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	82.000.000	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	445.031.000	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	55.050.000	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	308.741.000	
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	81.240.000	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	252.617.000	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	252.617.000	
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Pangan Segar Daerah Kabupaten Kota	169.028.000	
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	83.589.000	
2	10				PERTANAHAN	120.000.000	
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	120.000.000	Perangkat Daerah Lama
1-4	2-10	0-0	02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Perangkat Daerah Baru
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	120.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2	3	4
2	10	10	2,01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	
2	10	10	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	120.000.000	
2	11				LINGKUNGAN HIDUP	22.255.091.000	
					Dinas Lingkungan Hidup	22.255.091.000	Perangkat Daerah Lama
2-11	3-25	0-0	05		Dinas Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan		Perangkat Daerah Baru
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	475.000.000	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	375.000.000	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota	375.000.000	
2	11	02	2,02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab / Kota	100.000.000	
2	11	02	2,02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	100.000.000	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.350.000.000	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	770.000.000	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut	670.000.000	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	100.000.000	
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	580.000.000	
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronasi Penghentian Sumber Pencemaran	580.000.000	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	12.866.091.000	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab / Kota	12.866.091.000	
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100.000.000	
2	11	04	2,01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	12.766.091.000	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100.000.000	
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	100.000.000	
2	11	05	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	335.000.000	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	335.000.000	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100.000.000	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	235.000.000	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	774.000.000	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	774.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN							PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2		3	4
2	11	08	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		774.000.000	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		85.000.000	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		85.000.000	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		35.000.000	
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan		50.000.000	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		6.270.000.000	
2	11	11			Kegiatan Pengelolaan Sampah		6.170.000.000	
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		870.000.000	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		3.100.000.000	
2	11	11	2.01	0'2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		2.200.000.000	
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		100.000.000	
2	11	11	2.03	0'2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah		100.000.000	
2	12				ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		1.882.307.150	
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.882.307.150	Perangkat Daerah Lama
2-12	0-0	0-0	01		Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Perangkat Daerah Baru
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		239.453.120	
2	12	02	2.01		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		239.453.120	
2	12	02	2.01	04	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		149.453.120	
2	12	02	2.01	05	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		90.000.000	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL		457.121.760	
2	12	03	2.01		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil		457.121.760	
2	12	03	2.01	02	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		326.634.240	
2	12	03	2.01	01	Sub Kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting		130.487.520	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		1.185.732.270	
2	12	04	2.01		Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan		1.185.732.270	
2	12	04	2.01	03	Sub Kegiatan Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Perkembangan Penduduk		278.222.960	
2	12	04	2.01	05	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		75.977.310	
2	12	04	2.01	xx	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		831.532.000	
2	14				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		2.284.069.920	
					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana		2.284.069.920	Perangkat Daerah Lama
1-2	2-14	0-0	03		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Perangkat Daerah Baru
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		178.991.280	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2	3	4
2	14	02	2,01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	5.000.000	
2	14	02	2.01	07	Penyediaan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai iso lokal Kab/Kota	5.000.000	
2	14	02	2,02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	173.991.280	
2	14	03	2.02	12	pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	173.991.280	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.154.202.560	
2	14	03	2,03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	1.154.202.560	
2	14	03	2,03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	140.434.560	
2	14	03	2,03	xx	Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1.013.768.000	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	950.876.080	
2	14	04	2,01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	950.876.080	
2	14	04	2,01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	18.600.000	
2	14	04	2,01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	191.926.080	
2	14	04	2,01	xx	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyaluhan Keluarga Berencana (DAK KB)	740.350.000	
2	15				PERHUBUNGAN	12.247.807.400	
					Dinas Perhubungan	12.247.807.400	Perangkat Daerah Lama
2-15	0-0	0-0	01		Dinas Perhubungan		Perangkat Daerah Baru
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	12.247.807.400	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	7.052.912.360	
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	130.000.000	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	809.400.000	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	3.107.700.000	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	690.047.360	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.315.765.000	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	1.934.450.880	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	360.400.000	
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	123.000.000	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	1.451.050.880	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LL AJ di Jalan	115.884.000	
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	73.502.000	
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggara-an Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	42.382.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2	3	4
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.864.170.560	
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1.864.170.560	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	630.062.400	
2	15	02	2.03	03	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	630.062.400	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	650.327.200	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	544.327.200	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	106.000.000	
2	16				KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.001.332.000	
					Dinas Komunikasi dan Informatika	17.001.332.000	Perangkat Daerah Lama
2-16	2-20	2-21	04		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		Perangkat Daerah Baru
2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik	4.911.153.000	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	4.911.153.000	
2	16	02	2.01	02	Monitoring opini dan aspirasi publik	2.873.155.000	
2	16	02	2.01	04	Pegelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.380.353.000	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	184.890.000	
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	212.677.000	
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	260.078.000	
2	16	03			Program Aplikasi Informatika	9.013.353.000	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	5.071.450.000	
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	26.800.000	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5.044.650.000	
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3.941.903.000	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.300.200.000	
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	355.000.000	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	460.000.000	
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	302.553.000	
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	404.605.000	
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	119.545.000	
x	xx	xx			Program Sosialisasi di Bidang Cukai	3.076.826.000	
x	xx	xx	xxx		Peningkatan Jumlah Sasaran Penyebaran Informasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat (DBHCHT)	3.076.826.000	
x	xx	xx	xxx	xx	Penyelenggaraan Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat (DBHCHT)	3.076.826.000	
2	17				KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.528.360.000	
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	1.528.360.000	Perangkat Daerah Lama

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN							PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2		3	4
2-17	3-31	2-7	10		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Tenaga Kerja			Perangkat Daerah Baru
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		750.310.000	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		750.310.000	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		259.300.000	
2	17	05	2.01	xx	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK)		491.010.000	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		148.050.000	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		148.050.000	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi		148.050.000	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		630.000.000	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		630.000.000	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		630.000.000	
2	18				PENANAMAN MODAL		932.683.200	
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro		932.683.200	Perangkat Daerah Lama
2-18	3-32	0-0	06		Dinas Penanaman Modal dan Transmigrasi			Perangkat Daerah Baru
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		373.118.200	
2	18	03	2,01		Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		373.118.200	
2	18	03	2,01	02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/Kota		373.118.200	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		154.325.000	
2	18	05	2,01		Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota		154.325.000	
2	18	05	2,01	02	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal		154.325.000	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		373.640.000	
2	18	04	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		373.640.000	
2	18	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		169.000.000	
2	18	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		185.840.000	
2	18	04	2,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		18.800.000	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		31.600.000	
2	18	06	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		31.600.000	
2	18	06	2,01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		31.600.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1				2		3	4
2	19			KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		5.024.197.280	
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		5.024.197.280	Perangkat Daerah Lama
2-22	2-19	3-26	04	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Perangkat Daerah Baru
2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		700.000.000	
2	19	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda		700.000.000	
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Kabupaten/Kota	700.000.000	
2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		4.324.197.280	
2	19	03	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1.683.197.280	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.683.197.280	
2	19	03	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.226.000.000	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	1.226.000.000	
2	19	03	2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		1.000.000.000	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.000.000.000	
2	19	03	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		415.000.000	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	415.000.000	
2	20			STATISTIK		258.887.000	
				Dinas Komunikasi dan Informatika		258.887.000	Perangkat Daerah Lama
2-16	2-20	2-21	04	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			Perangkat Daerah Baru
2	20	02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		258.887.000	
2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		258.887.000	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	258.887.000	
2	21			PERSANDIAN		144.696.000	
				Dinas Komunikasi dan Informatika		144.696.000	Perangkat Daerah Lama
2-16	2-20	2-21	04	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			Perangkat Daerah Baru
2	21	02		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		144.696.000	
2	21	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		144.696.000	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	144.696.000	
2	22			KEBUDAYAAN		3.650.000.000	
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		3.650.000.000	Perangkat Daerah Lama
2-22	2-19	3-26	04	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Perangkat Daerah Baru
2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		3.250.000.000	
2	22	02	2.02	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		3.250.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2	3	4
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2.250.000.000	
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1.000.000.000	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	200.000.000	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	200.000.000	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	200.000.000	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	200.000.000	
2	22	05	2.01	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	200.000.000	
2	23				PERPUSTAKAAN	1.607.750.000	
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.607.750.000	Perangkat Daerah Lama
2-23	2-24	0-0	02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Perangkat Daerah Baru
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.607.750.000	
2	23	02	2,01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.184.750.000	
2	23	02	2,01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	324.000.000	
x	xx	xx	xxx		Pengembangan Perpustakaan di tingkat Kabupaten/Kota (dana DAK)	418.750.000	
2	23	02	2,01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	52.000.000	
x	xx	xx	xxx		Pengembangan Bahan Pustaka (dana DAK)	390.000.000	
2	23	02	2,02		Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah	423.000.000	
2	23	02	2,02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	338.000.000	
2	23	02	2,02	02	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	85.000.000	
2	24				KEARSIPAN	436.354.240	
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	436.354.240	Perangkat Daerah Lama
2-23	2-24	0-0	02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Perangkat Daerah Baru
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	436.354.240	
2	24	02	2,01		Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	216.030.820	
2	24	02	2,01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	216.030.820	
2	24	02	2,02		Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	220.323.420	
2	24	02	2,02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	220.323.420	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12.494.589.320	
3	25				KELAUTAN DAN PERIKANAN	639.590.000	
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	639.590.000	Perangkat Daerah Lama
2-11	3-25	0-0	05		Dinas Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan		Perangkat Daerah Baru
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	205.440.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2	3	4
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	205.440.000	
3	25	03	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	205.440.000	
3	25	05			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	434.150.000	
3	25	05	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	434.150.000	
3	25	05	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	434.150.000	
3	26				PARIWISATA	2.033.050.000	
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	2.033.050.000	Perangkat Daerah Lama
2-22	2-19	3-26	04		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Perangkat Daerah Baru
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	375.000.000	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	375.000.000	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	250.000.000	
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	125.000.000	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.058.050.000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.058.050.000	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.058.050.000	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	600.000.000	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	600.000.000	
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	600.000.000	
3	27				PERTANIAN	2.137.681.000	
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.137.681.000	Perangkat Daerah Lama
2-9	3-27	0-0	02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Perangkat Daerah Baru
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.444.709.000	
3	27	02	2,01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.181.559.000	
3	27	02	2,01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	252.141.000	
3	27	02	2,01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	929.418.000	
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	263.150.000	
3	27	02	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	263.150.000	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	35.729.000	
3	27	03	2,01		Pengembangan Prasarana Pertanian	35.729.000	
3	27	03	2,01	01	Pengelolaan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan / LP2B, kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan / KP2B dan lahan cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan / LCP2B	35.729.000	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	145.877.000	
3	27	05	2,01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	145.877.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2	3	4
3	27	05	2,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	145.877.000	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	139.166.000	
3	27	07	2,01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	139.166.000	
3	27	07	2,01	02	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecataman dan Desa	139.166.000	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	372.200.000	
3	27	04	2.01		PENJAMIN KESEHATAN HEWAN PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN KOTA	210.500.000	
3	27	04	2.01	1	Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	210.500.000	
3	27	04	2.04		PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	161.700.000	
3	27	04	2.04	2	Pengawasan peredaran hewan dan produk Hewan	161.700.000	
3	30				PERDAGANGAN	6.514.617.000	
					Dinas Perdagangan	6.514.617.000	Perangkat Daerah Lama
3-30	0-0	0-0	01		Dinas Perdagangan		Perangkat Daerah Baru
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	140.100.000	
3	30	02	2,01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	140.100.000	
3	30	02	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	140.100.000	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	79.724.000	
3	30	04	2,02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	79.724.000	
3	30	04	2,02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	79.724.000	
3	30	6			PROGRAM STANDARISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN	256.019.000	
3	30	06	2,01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	256.019.000	
3	30	06	2,01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	236.262.000	
3	30	06	2,01	02	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	19.757.000	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	672.545.000	
3	30	07	2,01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	672.545.000	
3	30	07	2,01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	512.545.000	
3	30	07	2,01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	160.000.000	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.316.229.000	
3	30	03	2,01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.331.060.000	
3	30	03	2,01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	110.000.000	
3	30	03	2,01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.221.060.000	
3	30	03	2,02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	3.985.169.000	
3	30	03	2,02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	704.745.000	
3	30	03	2,02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.280.424.000	
x	xx	xx			Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	50.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.	
1				2		3	4	
				(DBHCHT)				
x	xx	xx	xxx	Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau dilekat Pita Cukai Palsu, Tidak di lekat Pita Cukai		50.000.000		
3	31			PERINDUSTRIAN		1.156.151.320		
				Dinas Tenaga Kerja		1.156.151.320	Perangkat Daerah Lama	
2-17	3-31	2-7	10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Tenaga Kerja			Perangkat Daerah Baru	
3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		550.151.320		
3	31	02	2,01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		550.151.320		
3	31	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahkan Industri		250.000.000	
3	31	02	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri		60.000.000	
3	31	02	2,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		240.151.320	
x	xx	xx		PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI (DBH-CHT)		100.000.000		
x	xx	xx	xxx	Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian TAR dan Nikotin bagi Industri Kecil dan Menengah, serta pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practies bagi Industri Hasil Tembakau (DBH-CHT)		100.000.000		
3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		506.000.000		
3	31	04	2,01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		506.000.000		
3	31	04	2,01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota		506.000.000	
3	32			TRANSMIGRASI		13.500.000		
				Dinas Tenaga Kerja		13.500.000	Perangkat Daerah Lama	
2-18	3-32	0-0	06	Dinas Penanaman Modal dan Transmigrasi			Perangkat Daerah Baru	
3	32	03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		13.500.000		
3	32	03	2,01	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		13.500.000		
3	32	03	2,01	05	Penyuluhan Transmigrasi Lokal		13.500.000	
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		46.004.357.318		
4	01			SEKRETARIAT DAERAH		16.377.673.258		
				Sekretariat Daerah		16.377.673.258	Perangkat Daerah Lama	
4-1	0-0	0-0	01	Sekretariat Daerah			Perangkat Daerah Baru	
4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		10.653.243.180		
4	01	02	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan		1.505.289.500	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan			
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			
4	01	02	2,04	Fasilitasi Kerjasama Daerah		359.972.000		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2	3	4
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	359.972.000	
4	01	02	2,03		KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH	780.852.680	Bagian Hukum
4	01	02	2,03	01	FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	298.850.080	
4	01	02	2,03	02	FASILITASI BANTUAN HUKUM	282.928.800	
4	01	02	2,03	03	PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	199.073.800	
4	01	02	2.02		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8.007.129.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.007.129.000	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.247.112.978	
4	01	03	2,02		KEGIATAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	310.437.019	Bagian Administrasi Pembangunan
4	01	03	2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	208.587.269	
4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	101.849.750	
4	01	03	2,03		KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	452.942.359	
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	174.618.609	
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	278.323.750	
4	01	03	2.01		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	483.733.600	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	153.733.600	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	330.000.000	
x	xx	xx			PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI (DBH-CHT)	450.000.000	
x	xx	xx	xxx		Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ atau Pemangku Kepentingan melalui Forum Tatap Muka, Media Elektronik dan Media Cetak (DBH-CHT)	350.000.000	
x	xx	xx	xxx		Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai (DBH-CHT)	100.000.000	
x	xx	xx			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi (DBH-CHT)	300.000.000	
x	xx	xx	xxx		Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (DBH-CHT)	300.000.000	
4	01	04			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	3.727.317.100	
4	01	04	2.02		Penataan Organisasi	1.450.350.720	Bagian Organisasi
4	01	04	2,02	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	348.096.000	
4	01	04	2,02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	431.046.000	
4	01	04	2,02	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	671.208.720	
4	01	04	2.01		Pelaksanaan Administrasi Umum	122.658.240	Bagian Umum
4	01	04	2.01	01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaiannya	122.658.240	
4	01	04	2.03		Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.154.308.140	
4	01	04	2.03	01	Fasilitasi Keprotokolan	2.154.308.140	
4	02				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	29.626.684.060	
					Sekretariat DPRD	29.626.684.060	Perangkat Daerah Lama
4-2	0-0	0-0	01		Sekretariat DPRD		Perangkat Daerah Baru
4	02	02			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	14.736.823.130	
4	02	02	2.01		Layanan Administrasi DPRD	1.548.728.130	
4	02	02	2.01	02	Fasilitasi Rapat DPRD	1.158.982.504	
4	02	02	2.01	03	Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD	389.745.626	
4	02	02	2.02		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	13.188.095.000	
4	02	02	2.02	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12.738.095.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2	3	4
4	02	02	2.02	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	300.000.000	
4	02	02	2.02	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000	
4	02	03			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	14.889.860.930	
4	02	03	2.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	3.776.241.500	
4	02	03	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	3.776.241.500	
4	02	03	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.453.855.317	
4	02	03	2.02	03	Pembahasan APBD	1.453.855.317	
4	02	03	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	581.095.900	
4	02	03	2.02	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	232.438.360	
4	02	03	2.02	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	348.657.540	
4	02	03	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	3.014.778.513	
4	02	03	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	1.266.085.900	
4	02	03	2.04	03	Publikasi Dan Dokumentasi Dewan	1.553.819.800	
4	02	03	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	194.872.813	
4	02	03	2.05		Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	864.420.000	
4	02	03	2.05	03	Pelaksanaan Reses	864.420.000	
4	02	03	2.08		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5.199.469.700	
4	02	03	2.08	01	Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.799.469.700	
4	02	03	2.08	03	Pelaksanaan Undangan DPRD	400.000.000	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	13.758.212.664	
5	01				PERENCANAAN	2.542.658.560	
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.542.658.560	Perangkat Daerah Lama
5-1	5-4	0-0	02		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Perangkat Daerah Baru
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.358.914.560	
5	01	02	2.01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	923.664.560	
5	01	02	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	375.000.000	
5	01	02	2.01	03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	210.000.000	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	150.464.560	
5	01	02	2.01	07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	98.850.000	
5	01	02	2.01	08	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	89.350.000	
5	01	02	2.02		Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	87.000.000	
5	01	02	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah	87.000.000	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	348.250.000	
5	01	02	2.03	02	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	95.750.000	
5	01	02	2.03	03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	252.500.000	
5	01	03			PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	451.000.000	
5	01	03	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	40.000.000	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	15.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN							PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2		3	4
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan			25.000.000
5	01	03	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia			411.000.000
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia			269.850.000
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia			141.150.000
5	01	04			PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM			242.074.000
5	01	04	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian			242.074.000
5	01	04	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian			47.237.000
5	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian			194.837.000
5	01	05			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN			490.670.000
5	01	05	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup			120.000.000
5	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup			120.000.000
5	01	05	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan			215.670.000
5	01	05	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan			101.785.000
5	01	05	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan			113.885.000
5	01	05	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahana			155.000.000
5	01	05	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahana.			155.000.000
5	02				KEUANGAN			4.273.615.040
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			3.578.310.040
5-2	0-0	0-0	02		Badan Keuangan dan Aset Daerah			Perangkat Daerah Lama
								Perangkat Daerah Baru
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			3.241.121.000
5	02	02	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.892.592.000
5	02	02	2,01	01	Penyusunan KUA dan PPAS			1.100.000.000
5	02	02	2,01	02	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS			75.000.000
5	02	02	2,01	03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD			139.999.000
5	02	02	2,01	04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD			68.529.000
5	02	02	2,01	05	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			454.414.000
5	02	02	2,01	07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD			54.650.000
5	02	02	2,02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			250.000.000
5	02	02	2,02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			130.000.000

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2	3	4
5	02	01	2,02	04	Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	120.000.000	
5	02	02	2,03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.098.529.000	
5	02	02	2,03	02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	280.000.000	
5	02	02	2,03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	40.000.000	
5	02	02	2,03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100.000.000	
5	02	02	2,03	12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	678.529.000	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	337.189.040	
5	02	03	2,01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	337.189.040	
5	02	03	2,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	157.740.000	
5	02	03	2,01	07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	129.449.040	
5	02	03	2,01	11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	50.000.000	
					Badan Pendapatan Daerah	695.305.000	Perangkat Daerah Lama
5-2	0-0	0-0	03		Badan Pendapatan Daerah		Perangkat Daerah Baru
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	695.305.000	
5	02	04	202		Perencanaan Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	695.305.000	
5	02	04	202	02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	365.000.000	
5	02	04	202	04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	42.300.000	
5	02	04	202	06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi	150.000.000	
5	02	04	202	07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	10.750.000	
5	02	04	202	09	Pemeliharaan dan Pemutakiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	9.750.000	
5	02	04	202	10	Pemeriksaan Pajak Daerah	30.600.000	
5	02	04	202	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	86.905.000	
5	03				KEPEGAWAIAN	1.965.568.260	
					Badan Kepegawaian Daerah	1.965.568.260	Perangkat Daerah Lama
5-3	0-0	0-0	01		Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia		Perangkat Daerah Baru
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.965.568.260	
5	03	02	2.01		Pengelolaan Data dan Infromasi ASN	338.787.200	
5	03	02	2,01	04	Pengelolaan Data Kepegawaian	338.787.200	
5	03	02	2,02		Administrasi Kepegawaian	1.266.281.060	
5	03	02	2,02	01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	848.513.060	
5	03	02	2,02	02	Penataan dan Mutasi Jabatan	309.888.000	
5	03	02	2,02	04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	53.940.000	
5	03	02	2,02	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	53.940.000	
5	03	02	2,03		Peningkatan Kapasitas ASN	291.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2	3	4
5	03	2	2,03	1	Peningkatan Kapasitas ASN	119.600.000	
5	03	2	2,03	3	Pengembangan Assessment Center	171.400.000	
5	03	02	2,05		Pembinaan ASN	69.500.000	
5	03	02	2,05	03	Penegakan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	69.500.000	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.109.251.204	
					Badan Kepegawaian Daerah	4.109.251.204	Perangkat Daerah Lama
5-3	0-0	0-0	01		Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia		Perangkat Daerah Baru
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.109.251.204	
5	04	02	2,01		Pengembangan Kompetensi Teknis	972.087.204	
5	04	02	2,01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Pejabat Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	972.087.204	
5	04	02	2,02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.137.164.000	
5	04	02	2,02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.137.164.000	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	867.119.600	
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	867.119.600	Perangkat Daerah Lama
5-1	5-4	0-0	02		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Perangkat Daerah Baru
5	05				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	867.119.600	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	489.570.600	
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.	261.204.100	
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	228.366.500	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	377.549.000	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	178.910.000	
5	05	02	2,04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	198.639.000	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	2.205.762.000	
6	01				UNSUR PENGAWAS	2.205.762.000	
					Inspektorat	2.205.762.000	Perangkat Daerah Lama
6-1	0-0	0-0	01		Inspektorat		Perangkat Daerah Baru
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.199.162.000	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.199.162.000	
6	01	02	2.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan	391.934.000	
6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan	497.072.000	
6	01	02	2.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	828.990.000	
6	01	02	2.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	481.166.000	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.600.000	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.600.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1					2	3	4
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6.600.000	
7					UNSUR KEWILAYAHAN	28.209.997.230	
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN	28.209.997.230	
					Kecamatan Manguharjo	10.123.266.784	Perangkat Daerah Lama
7-1	0-0	0-0	01		Kecamatan Manguharjo		Perangkat Daerah Baru
7	01	03			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.208.462.650	
7	01	03	2,02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Rutin Kelurahan)	6.146.257.210	
7	01	03	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.146.257.210	
7	01	03	2,03		Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Kasi Pembangunan)	62.205.440	
7	01	03	2,03	01	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	62.205.440	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.468.891.760	
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kasi Pemas)	3.468.891.760	
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	318.891.760	
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasaranan Kelurahan (Dana Kelurahan)	1.810.000.000	
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dana Kelurahan)	1.340.000.000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	263.985.880	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kasi Kesos)	129.180.440	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	129.180.440	
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada (Kasi Trantib)	134.805.440	
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	134.805.440	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	181.926.494	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah (Kasi Pemerintahan)	181.926.494	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945	111.926.494	
7	01	05	2,01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	55.000.000	
7	01	05	2,01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	15.000.000	
					Kecamatan Kartoharjo	9.345.665.680	Perangkat Daerah Lama
7-1	0-0	0-0	02		Kecamatan Kartoharjo		Perangkat Daerah Baru
2	19	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.552.902.400	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.	
1					2		3	4
2	19	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		5.490.696.960	
2	19	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kartoharjo		5.490.696.960	
2	19	02	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		62.205.440	
2	19	02	2,03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		62.205.440	
2	19	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		3.432.558.400	
2	19	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		3.432.558.400	
2	19	03	2,02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		282.558.400	
2	19	03	2,02	02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		1.896.720.000	
2	19	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.253.280.000	
2	19	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		188.125.520	
2	19	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum		79.405.440	
2	19	04	2,01	02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		79.405.440	
2	19	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		108.720.080	
2	19	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		108.720.080	
		05			PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		172.079.360	
2	22	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah		172.079.360	
2	22	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta		60.766.640	
2	22	05	2,01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		71.481.360	
2	22	05	2,01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal		39.831.360	
					Kecamatan Taman		8.741.064.766	Perangkat Daerah Lama
7-1	0-0	0-0	03		Kecamatan Taman			Perangkat Daerah Baru
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.139.642.520	
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		5.081.864.680	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan se Kecamatan Taman		5.081.864.680	
7	01	02	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		57.777.840	
7	01	02	2,03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		57.777.840	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN		3.365.638.726	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1				2		3	4
				KELURAHAN			
7	01	03	2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		3.365.638.726	
7	01	03	2,02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	215.638.726	
7	01	03	2,02	02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	900.000.000	
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.250.000.000	
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		129.344.640	
7	01	04	2,01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum		56.916.800	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	56.916.800	
7	01	04	2,02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		72.427.840	
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	72.427.840	
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		106.438.880	
7	01	05	2,01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah		106.438.880	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta	40.312.960	
7	01	05	2,01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	40.312.960	
7	01	05	2,01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	25.812.960	
8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		3.171.231.650	
8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		3.171.231.650	
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		3.171.231.650	Perangkat Daerah Lama
8-1	0-0	0-0	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Perangkat Daerah Baru
8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		589.298.500	
8	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		589.298.500	
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	589.298.500	
8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		921.058.100	
8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		921.058.100	
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	725.062.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.	
1					2		3	4
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		195.996.100	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		222.985.000	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		222.985.000	
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		222.985.000	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		484.692.000	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		484.692.000	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		95.000.000	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		389.692.000	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		953.198.050	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		953.198.050	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		953.198.050	

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Menurut Penunjang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET	PAGU
DINAS PENDIDIKAN								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		200.926.605.658
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	7.653.026.248
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	7.653.026.248
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	186.278.180.958
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	186.278.180.958
X	XX	01	2.04		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		6.995.398.452
X	XX	01	2.04	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	6.112.793.152
X	XX	01	2.04	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	276.705.300

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU
X	XX	01	2.04	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	329.000.000
X	XX	01	2.04	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	136.100.000
X	XX	01	2.04	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	140.800.000
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	19,73	32.481.339.940
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	218.278.000
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	218.278.000
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	29.691.891.460
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	29.691.891.460
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	81,99	2.571.170.480
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	1.973.541.480
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	300.000.000
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	14.126.000
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	201.098.000
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	82.405.000
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		22.119.231.956
X	XX	01	2.02	1	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	20.962.015.956
X	XX	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	20.962.015.956
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		1.157.216.000
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	1.157.216.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		10.014.720.268
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	40.000.000
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	40.000.000
X	XX	01	1,02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	6.200.000.000
b	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	6.200.000.000
X	XX	01	1,03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		3.774.720.268
X	XX	01	1,03	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	2.874.720.268

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU
X	XX	01	1,03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	200.000.000
X	XX	01	1,03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	250.000.000
X	XX	01	1,03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	200.000.000
X	XX	02	2,03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	250.000.000
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		8.812.166.400
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	106.000.000
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	106.000.000
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	5.000.000.000
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	5.000.000.000
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	81	3.591.166.400
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	1.346.756.000
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	183.880.000
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	28.000.000
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	1.560.360.000
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	472.170.400
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	115.000.000
X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	105.000.000
X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	persentase peserta yang paham	100%	10.000.000
SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN								
1	5	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		10.053.687.000
1	5	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	84.850.000
1	5	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	84.850.000
1	5	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	6.031.369.000
1	5	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	6.031.369.000
1	5	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		3.549.468.000
1	5	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	2.639.468.000
1	5	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	250.000.000
1	5	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	30.000.000

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU
1	5	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	500.000.000
1	5	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	30.000.000
1	5	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang representatif	100%	100.000.000
1	5	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	388.000.000
1	5	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	299.000.000
1	5	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	persentase pemenuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	89.000.000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	5	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		1.939.072.000
1	5	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	20.000.000
1	5	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	20.000.000
1	5	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	1.287.360.000
1	5	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	1.287.360.000
1	5	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		631.712.000
1	5	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	384.212.000
1	5	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	50.000.000
1	5	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	25.000.000
1	5	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	157.500.000
1	5	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	15.000.000

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	50	6.442.905.810
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	159.278.000
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	159.278.000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	4.456.929.618
x	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	4.456.929.618
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	80	1.803.236.490
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	1.191.802.290
x	xx	01	2.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	225.000.000
x	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	140.000.000
x	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	170.634.200

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU
x	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	75.800.000
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	23.461.702
X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	persentase peserta yang paham	100%	23.461.702
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		4.037.898.500
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	40.000.000
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	40.000.000
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	2.971.503.500
b	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	2.971.503.500
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		1.026.395.000
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	708.756.000
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	212.780.000
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	35.700.000
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	44.159.000
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	25.000.000
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		5.597.864.000
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Kerja Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	137.000.000
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	137.000.000
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	3.863.594.000
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	3.863.594.000
X	XX	01	2,03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		1.597.270.000
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	949.126.000
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	186.644.000
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	178.000.000
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	55.500.000
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	50.000.000
X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi sedang/berat/rumah/gedung kantor	persentase gedung kantor yang representatif	100%	178.000.000

KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP SERTA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
X	X	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		14.255.200.000
X	X	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	81.000.000
X	X	01	2.01	02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	81.000.000
		01	2.02	Administrasi Keuangan	persentase penuhan dokumen administrasi keuangan	100%	11.122.200.000
X	X	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	11.122.200.000
		01	2.03	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		2.870.000.000
X	XX	01	2.03	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	1.300.000.000
X	XX	01	2.03	18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase penuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	175.000.000
X	XX	01	2.03	28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	70.000.000
X	XX	01	2.03	30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	1.250.000.000
X	XX	01	2.03	34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	75.000.000
X	XX	01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	182.000.000
X	X	01	2.04	02 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	persentase penuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	182.000.000
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	85	5.723.050.850
2	12	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	62.811.360
2	12	01	2.01	02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	62.811.360
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan	persentase penuhan dokumen administrasi keuangan	100	4.332.490.210
2	12	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	4.332.490.210
2	12	01	2.03	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		1.327.749.280
2	12	01	2.03	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	1.019.450.480
2	12	01	2.03	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase penuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	85.649.200
2	12	01	2.03	28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	30.000.000
2	12	01	2.03	30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	25.000.000
2	12	01	2.03	34 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	167.649.600
DINAS PERHUBUNGAN							
X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		10.845.937.095
X	XX	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	102.089.400

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	21,99	6.664.064.000
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	115.000.000
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	115.000.000
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	3.733.400.000
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	3.733.400.000
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		2.815.664.000
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	2.315.492.000
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	135.172.000
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	132.500.000
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	100.000.000
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	132.500.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TRANSMIGRASI

X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	13,00	5.561.209.120
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	44.000.000
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	44.000.000
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	4.202.386.800

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	4.202.386.800
X	XX	01	2.04		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	88,25	1.314.822.320
X	XX	01	2.04	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	934.822.320
X	XX	01	2.04	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase penuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	200.000.000
X	XX	01	2.04	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	80.000.000
X	XX	01	2.04	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	45.000.000
X	XX	01	2.04	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	55.000.000
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA								
1	5	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		5.928.463.000
1	5	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	40.000.000
1	5	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	40.000.000
1	5	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penuhan dokumen administrasi keuangan	100%	3.184.463.000
1	5	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	3.184.463.000
1	5	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		2.704.000.000
1	5	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	2.124.650.000
1	5	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase penuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	299.700.000
1	5	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	175.000.000
1	5	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	50.000.000
1	5	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	54.650.000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		3.612.325.999
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	30.000.000
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	30.000.000
1	5	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase penuhan dokumen administrasi keuangan	100%	2.845.195.927
b	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	2.845.195.927
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		737.130.072
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	525.278.072
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase penuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	66.000.000
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	49.650.000

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	51.552.000
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	44.650.000
DINAS PERDAGANGAN								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		9.713.226.000
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	90.000.000
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	90.000.000
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	7.667.000.000
b	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	7.667.000.000
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		1.956.226.000
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	1.051.226.000
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	350.000.000
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	100.000.000
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	325.000.000
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	130.000.000
SEKRETARIAT DAERAH								
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	14,52	888.324.500
X	XX	01	2,01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	7.417.000
X	XX	01	2,01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	7.417.000
X	XX	01	2,02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	499.157.500
X	XX	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	499.157.500
X	XX	01	2,03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	80	381.750.000
X	XX	01	2,03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	244.250.000
X	XX	01	2,03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	100.000.000
X	XX	01	2,03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	7.500.000
X	XX	01	2,03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	20.000.000
X	XX	01	2,03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	10.000.000
BAGIAN HUKUM								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	14,52	1.559.145.320
X	XX	01	2,01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan	100%	38.923.200

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	evaluasi perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	38.923.200	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase penuhan dokumen administrasi keuangan	100%	1.114.730.000	
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	1.114.730.000	
X	XX	01	2.03		Adminsitrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	79,93	405.492.120	
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	233.551.400	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	130.000.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	2.500.000	
X	XX	02	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	20.547.600	
X	XX	02	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	18.893.120	
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	14,52	1.224.456.000	
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	20.000.000	
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)	6 dokumen	20.000.000	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	712.296.000	
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	712.296.000	
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	100%	492.160.000	
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatifpersentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	276.960.000	
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	100%	180.000.000	
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	4.000.000	
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	22.000.000	
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	9.200.000	
BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	14,52	1.656.080.534	
X	XX	01	2,01		KEGIATAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	33.252.000	
X	XX	01	2,01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	33.252.000	
X	XX	01	2,02		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	1.209.235.000	
X	XX	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	1.209.235.000	
X	XX	01	2,03		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,75	413.593.534	

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU
X	XX	01	2,03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perangkat Daerah		
X	XX	01	2,03	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	95.798.950
X	XX	01	2,03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	2.000.000
X	XX	01	2,03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	14.946.958
X	XX	01	2,03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	12.350.000
BAGIAN ORGANISASI								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	14,52	851.493.888
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	485.567.500
X	XX	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	485.567.500
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	82,75	365.926.388
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	164.727.108
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	167.326.280
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	1.680.000
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	18.963.000
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	13.230.000
BAGIAN UMUM								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	14,52	31.695.416.810
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	145.008.000
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	145.008.000
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	11.227.984.730
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	11.227.984.730
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	82,75	11.298.882.000
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	5.200.000.000
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	2.000.000.000
X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	persentase rumah dinas yang layak digunakan	100%	1.669.539.900
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	514.676.500
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	1.485.065.600
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	229.600.000
X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang representatif	100 %	200.000.000
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	9.023.542.080

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU
X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	3.800 orang	8.825.292.080
X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	persentase pemenuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	50 orang	198.250.000
SEKRETARIAT DPRD								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	7.019.560.956
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	71.031.500
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	71.031.500
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	2.100.000.000
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	2.100.000.000
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	100%	4.749.482.000
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	2.612.023.000
X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	495.846.000
X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	100%	85.000.000
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	616.821.000
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	374.642.000
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	315.150.000
X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang representatif	100%	250.000.000
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	99.047.456
X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	persentase pemenuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	94.047.456
X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase peserta yang paham	100%	5.000.000
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		7.493.926.500
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	214.926.500
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	214.926.500
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	5.895.000.000
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	5.895.000.000
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	100%	1.375.000.000
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	802.000.000
X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	376.000.000
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	25.000.000

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	32.000.000
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	60.000.000
X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang representatif	100%	80.000.000
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	9.000.000
X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	persentase peserta yang paham	100%	9.000.000
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	indeks RB OPD	49.946.742.246
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	21.032.000
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	21.032.000
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	32.990.785.046
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	32.990.785.046
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	100%	16.934.925.200
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	16.557.925.200
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	200.000.000
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	50.000.000
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	40.000.000
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	87.000.000
BADAN PENDAPATAN DAERAH								
X	XX	01			RPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		9.273.257.000
X	XX	01	201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	10.800.000
X	XX	01	201	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	10.800.000
X	XX	01	202		Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	8.429.382.000
X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	8.429.382.000
X	XX	01	203		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		742.075.000
X	XX	01	203	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	532.575.000
X	XX	01	203	18	RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	50.000.000
X	XX	01	203	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	15.000.000
X	XX	01	203	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	44.500.000
X	XX	01	203	34	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	100.000.000

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		10.675.632.036
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	61.784.000
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	61.784.000
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	9.477.112.766
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	9.477.112.766
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	93,34%	1.129.535.270
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	809.627.070
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	143.751.000
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	71.298.000
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	59.559.200
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	45.300.000
X	XX	01	2,04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	7.200.000
X	XX	01	2,04	10	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Persentase peserta yang paham	100%	7.200.000

KECAMATAN KARTOHARJO

1		01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		10.500.786.560
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	61.784.000
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	61.784.000
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	8.815.512.700
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	8.815.512.700
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	83%	1.616.989.860
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	939.678.860
X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	138.900.000
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	53.000.000
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	35.251.000
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	34.960.000
X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang representatif	100%	415.200.000
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	6.500.000
X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase peserta yang paham	100%	6.500.000

KECAMATAN TAMAN

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		10.410.013.129
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	58.967.520
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	58.967.520
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	9.225.821.629
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	9.225.821.629
X	XX	01	1.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	88%	1.120.623.980
X	XX	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	887.882.980
X	XX	01	1.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	97.793.000
X	XX	01	1.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	50.000.000
X	XX	01	1.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	48.448.000
X	XX	01	1.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	36.500.000
X	XX	01	1.03		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	4.600.000
X	XX	01	1.03	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase peserta yang paham	100%	4.600.000

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		3.638.352.867
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	112.116.200
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	112.116.200
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	2.887.145.114
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	2.887.145.114
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	95,95	639.091.553
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	542.699.553
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	39.000.000
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	7.500.000
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	24.892.000
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	25.000.000

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. Berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 55 klasifikasi belanja daerah terdiri atas :

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tidak Terduga dan
- d. Belanja Transfer

Belanja operasi merupakan belanja pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset alinnya yang memberi manfaat lebih dari satu (1) periode akutansi. Belanja Tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah ke pemerintah desa. Pada tahun 2021 plafon anggaran sementara berdasarkan klasifikasi belanja adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Klasifikasi Belanja
Tahun Anggaran 2021**

Kode	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
2.1.	BELANJA OPERASI	920.440.004.156,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	510.149.551.523,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	374.523.659.133,00
2.1.3	Belanja Bunga	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	13.309.367.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	22.457.426.500,00
2.2	BELANJA MODAL	191.302.646.309,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	700.000.000,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.039.617.816,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.768.418.557,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.358.230.563,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.517.749.728,00
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	918.629.645,00

2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	0,00
2.4.1	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.112.742.650.465,00

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

daerah dan pengeluaran pemberian daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 27 ayat (3), Pemberian Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Jumlah Pemberian Daerah Kota Madiun Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 127.248.391.325,00 yang akan digunakan untuk menutup defisit antara belanja dengan pendapatan. Jumlah tersebut dirinci dalam plafon anggaran pemberian Tahun anggaran 2021 yang dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Sementara Pemberian Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	Penerimaan Pemberian	127.248.391.325,00
3.1.1	Penggunaan SiLPA	127.248.391.325,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
3.2	Pengeluaran Pemberian	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
3.3	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	127.248.391.325,00
	Sisa Lebih / Kurang Anggaran (SiLPA) Berjalan	0,00

Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020

Penerimaan pemberian Kota Madiun tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 127.248.391.325,00 yang diharapkan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran APBD tahun 2020 yang tidak bisa direalisasikan maupun pelampauan pendapatan. Sementara proyeksi pengeluaran pemberian sebesar Rp.0,00. Sehingga jumlah pemberian netto diperoleh sebesar Rp. 127.248.391.325,00. Sedangkan SiLPA yang diperoleh pada tahun 2021 Rp. 0,00.

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah disusun dan disepakati bersama guna dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2021.

Madiun, 4 Agustus 2020

WALIKOTA MADIUN

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN,**

ANDI RAYA BAGUS M.S, SH

WAKIL KETUA,

Drs. ISTONO, M.Pd

WAKIL KETUA,

Drs. H. ARMAYA